

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN MELALUI SISTEM
KEUANGAN DESA (Siskeudes) 2.0.5
(Studi di Desa Gebang, Munca, dan Hanura Kabupaten Pesawaran)**

Tesis

Oleh

AMANDA CLARA NANDA VADYA

NPM 2226021006



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN MELALUI SISTEM
KEUANGAN DESA (Siskeudes) 2.0.5
(Studi di Desa Gebang, Munca, dan Hanura Kabupaten Pesawaran)**

Oleh

AMANDA CLARA NANDA VADYA

NPM 2226021006

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN MELALUI SISTEM KEUANGAN DESA (Siskeudes) 2.0.5 (Studi di Desa Gebang, Munca dan Hanura Kabupaten Pesawaran)

Oleh

AMANDA CLARA NANDA VADYA

Permasalahan penelitian ini adalah masih adanya ketidakselarasan konsep dengan realitas dalam pelaksanaan sistem keuangan desa sebagai kebaruan dalam tata kelola keuangan desa yang dijalankan oleh pemerintah Desa Gebang, Munca dan Hanura masih adanya kendala seperti belum berjalan optimal, SDM yang kurang mumpuni seperti kurangnya bimbingan teknis, laporan yang tidak seimbang dan membutuhkan prasarana yang canggih. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis proses pengelolaan keuangan desa dengan konsep yang berbeda melalui Siskeudes di desa Gebang, Munca dan Hanura, serta mengkaji dan menganalisis apakah pengelolaan keuangan Desa Gebang, Munca dan Hanura efektif dengan sistem keuangan desa (Siskeudes). akan dikaji menggunakan teori organisasi meliputi Input, Proses, Output dan POAC, serta Teori Efektivitas dari Campbell. Tipe penelitian adalah penelitian kualitatif dengan yang melibatkan 9 (Sembilan) orang informan meliputi kaur keuangan dan perencanaan Desa Gebang, Kaur Keuangan desa Munca, sekretaris Desa Hanura dan Kaur Keuangan dan Masyarakat yang merangkap menjadi operator Siskeudes. Hasil dari penelitian ini proses pengelolaan siskeudes serta tujuan-tujuan peran utama menggunakan tahap dari POAC (*Planning, Organizing, Actuating dan Controlling*) sebagai acuan dalam proses penginputan keuangan desa sudah memenuhi guna menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sistem keuangan desa, serta dalam hal proses untuk ketiga desa telah sesuai dengan proporsi yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah tentang Desa nomor 47 tahun 2015 dan ukuran dari indikator efektivitas meliputi keberhasilan program, ketepatan sasaran,kepuasan, telah berjalan efektif, akan tetapi pada indikator tingkat output dan input di desa Gebang dan Munca belum berjalan maksimal guna mencapai tujuan transparansi dan akuntabilitas.

Kata kunci: Efektivitas, Pengelolaan Keuangan, POAC

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF FINANCIAL MANAGEMENT THROUGH THE VILLAGE FINANCIAL SYSTEM (Siskeudes) 2.0.5 (A Study in Gebang, Munca, and Hanura Villages, Pesawaran Regency)

**By
AMANDA CLARA NANDA VADYA**

The issue of this research lies in the discrepancy between the concept and the reality in the implementation of the village financial system as a new approach to village financial management conducted by the governments of Gebang, Munca, and Hanura Villages. Several challenges remain, such as suboptimal operation, inadequate human resources, lack of technical guidance, unbalanced reporting, and the need for advanced infrastructure. The purpose of this research is to examine and analyze the financial management process in Gebang, Munca, and Hanura Villages through Siskeudes, and to determine whether the financial management in these villages is effective with the Village Financial System (Siskeudes). The study is based on organizational theory, including Input, Process, Output, and POAC, as well as Campbell's Theory of Effectiveness. This qualitative research involved nine (9) informants, including the financial and planning officers of Gebang Village, the financial officer of Munca Village, the secretary of Hanura Village, and community members. The results of this study indicate that the Siskeudes management process and the primary roles are aligned with the POAC (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling) stages as a reference in the financial input process, thereby fulfilling the purpose of creating accountability and transparency in village financial management. Additionally, the process in the three villages has met the proportions set out in Regulation No. 47 of 2015 and the effectiveness indicators, including program success, target accuracy, satisfaction, and effective implementation. However, the output and input levels in Gebang and Munca Villages have not yet maximized the achievement of transparency and accountability objectives.

Keywords: Effectiveness, Financial Management, POAC

Judul Tesis : **EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN MELALUI SISTEM KEUANGAN DESA (Siskeudes) 2.0.5 (Studi di Desa Gebang, Munca dan Hanura kabupaten Pesawaran)**

Nama Mahasiswa : **Amanda Clara Nanda Wadya**

NPM : **2226021006**

Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Dr. Feni Rosalia, M.Si.

NIP. 196902191994032001



Dr. Pitojo Budiono, M.Si.

NIP. 196405081993031004

**2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**



Dr. Feni Rosalia, M.Si.

NIP. 196902191994032001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

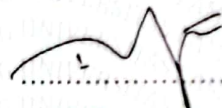
Ketua

Dr. Feni Rosalia, M.Si.



Sekretaris

Dr. Pitojo Budiono, M.Si.



Penguji Utama

Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 19610807 198703 2 001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.

NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 21 Agustus 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN HAK INTELEKTUAL

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul "Efektivitas Pengelolaan Keuangan Melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 2.0.5 (studi desa Gebang, Munca dan Hanura) adalah hasil karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hal intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya juga bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Amanda Clara Nanda Vadya
NPM. 2226021006

RIWAYAT HIDUP



AMANDA CLARA NANDA VADYA lahir di Lampung, 12 Juni 2000 buah hati dari pasangan Ayahanda “Pedi Aprianto” dan Ibunda “Edya Sari Oktiana”. Penulis pertama kali menempuh pendidikan formal di Taman Kanak-kanak (TK) Bina Balita tahun 2005-2006. Kemudian tahun 2006 penulis melanjutkan pendidikan di SDN Al-Kautsar dan diselesaikan tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas di SMP Al-Kautsar hingga lulus tahun 2015 dan di SMA Al-Kautsar yang diselesaikan tahun 2018. Pada tahun 2018, penulis diterima sebagai salah satu mahasiswa di Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur paralel dan *Alhamdulillah* selesai tahun 2022 dengan predikat *cumlaude*. *Alhamdulillah* pada tahun yang sama yaitu 2022, penulis kembali diberikan amanah oleh orang tua untuk melanjutkan pendidikan di Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan (konsentrasi Manajemen Pemerintahan) melalui jalur tes.

MOTTO

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu.”

(Umar bin Khattab)

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.”

(Ali bin Abi Thalib)

“Berjuanglah sampai lelahmu tak lagi terhiraukan, karna yang dunia butuhkan adalah hasilmu bukan prosesmu”

(amanda C)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kupersembahkan tesis ini kepada:

Kedua Orang tuaku tercinta Papa dan Mama serta Nenek yang telah memberikan cinta, kasih dan sayang, Do'a, dukungan dan segala hal yang terbaik.

Papa dan Mama serta Nenek yang selalu menjadi Support System terbaikku dan selalu berusaha memberikan apapun yang ada untuk putrimu. Izinkan karya ini kupersembahkan kepada kalian, semoga menjadi salah satu wujud baktiku untuk memperoleh ridho Mama dan Papa sehingga Allah SWT ridho denganku.

Tiada hal yang lebih baik yang akan kuberikan melainkan segala sesuatu yang papa dan mama ridho'i. Apapun itu..

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Serta

Almamaterku Tercinta

SANWACANA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah atas berkah rahmat dan ridho-Nya penulis telah menyelesaikan naskah tesis dengan judul “EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN MELALUI SISTEM KEUANGAN DESA (Siskeudes) 2.0.5 (Studi di Desa Gebang, Munca dan Hanura Kabupaten Pesawaran)” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister di Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis sangat menyadari bahwa dalam kepenulisan naskah tesis sangat jauh dari kata sempurna, maka dari itu dalam prosesnya banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi langkah awal bagi peneliti di masa mendatang untuk mengembangkan topik serupa dalam objek yang berbeda.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
3. Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan FISIP Universitas Lampung
4. Dr. Feni Rosalia, M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung
5. Dr. Feni Rosalia, M.Si. sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Pitojo Budiono, M.Si. sebagai Pembimbing Pendamping yang telah banyak memberikan masukan, kritik, dan saran secara substansial yang membangun dan

bermanfaat dalam penyusunan tesis.

6. Dr.Maulana Mukhlis,M.IP.. sebagai Penguji Utama yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran sebagai wujud penyempurnaan penyusunan tesis.
7. Segenap Dosen Magister Ilmu Pemerintahan, FISIP, UNILA dan Staf Sekretariat. kepada Bang Penda, Mba Fitri dan Mba Vivi selaku staf sekretariat yang selalu membantu berbagai hal administrasi dan lainnya selama proses menyelesaikan studi.
8. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Pedi Aprianto dan Ibunda Edya Sari Oktiana Serta Nenek saya Armanida dan adik saya Muhammad Rafael yang telah memberikan seluruh kasih dan sayang, cinta, do'a, dorongan, motivasi, *support* materiil dan non-materiil dan segalanya dalam hidup penulis dan dalam proses pendidikan hingga sampai dititik ini.
9. Seluruh informan yang telah memberikan data dan informasi terkait topik penelitian secara komprehensif. Kepala Desa Gebang Anik Rekayani yang sangat banyak membantu, Lestari Anggar kaur keuangan desa Gebang, Mukhlis Solihin Kaur Perencanaan desa Gebang, Muhammad Uci dan Yeni Suita Asmara Kaur Keuangan Desa Munca, Yudi Aprianto Sekretaris desa Hanura dan Satriani kaur keuangan desa Hanura
10. Bapak Sugiharto, Ibu Nelly Haryaty (Almh), Muhamad Fakhri, Muhammad Yasir dan Akim yang telah memberikan do'a, dorongan, support dan waktu dalam proses awal pendidikan s2 hingga sampai dititik ini.
11. Segenap rekan saya sedari SD sampai sekarang, Elza Rafika, Azarinnabila, Valen, Andina dan teman "Mieayamkuahpisah" yang telah senantiasa mendengarkan keluh kesah saya, dan terus menyemangati untuk menyelesaikan pendidikan ini.
12. Rekan saya dari SMA Elma Nurhaya terima kasih sudah selalu memberikan tampanan realita setiap dibutuhkan
13. Segenap rekan saya sedari kuliah S1 sampai sekarang Taniya Dinda, Kharuhita, Femmy, Risa, Yosi dan Dina.
14. Segenap rekan di Magister Ilmu Pemerintahan angkatan 22 tanpa terkecuali, terkhusus konsentrasi manajemen pemerintahan (Bang Herwin, Bang Sukmi,

Bang Amat, Nadia, Kak Roida, Kak Putri, Mba Prilia, Mba Dinda, dan Mba Frida) yang telah bersama-sama selama aktif perkuliahan.

15. Rekan-rekan pejuang tesis Mba Resty, Bang Amir, Bang Etro, Bang Hendra, Bang Erwin, Nadia, Bang Amat, Harido yang telah berjuang bersama sebagai penghuni ruang tunggu mahasiswa, terima kasih atas canda, tawa, petuah dan kebersamaannya serta semoga keberuntungan-Nya senantiasa berpihak kepada kita.
16. Seluruh pihak yang berkontribusi dalam proses menyelesaikan pendidikan Magister tanpa terkecuali yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena keterbatasan penulis.
17. Deo Bernedy dan Nabila Septi terima kasih sudah memberikan semangat
18. Kepada Amanda Clara Nanda Vadya terima kasih telah sampai di titik ini atas prosesmu yang panjang itu. Tidak peduli rasa takut dan sakit Gerdmu kadang kumat. Setiap langkah adalah awalan, senantiasa iringi dengan syukur, sabar dan sholat. Dari dan untukku 'Perempuan Kuat'.

Semoga Allah SWT. memberikan keberkahan dan keridhoan atas apa yang kita usahakan, dan Rasulullah Muhammad SAW. mengakui kita sebagai umatnya (kelak), Aamiin.

Bandar Lampung, 21 Agustus 2024

Amanda Clara Nanda Vadya

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	17
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Manfaat Penelitian	17
1.4.1 Secara Teoritis	17
1.4.2 Secara Praktis	17
II. TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Efektivitas	18
2.2 <i>E-Government</i>	24
2.3 Teori Organisasi.....	30
2.4 Sistem Keuangan Desa	35
2.5 Kerangka Pikir	39
III. METODE PENELITIAN	41
3.1 Tipe Penelitian	41
3.2 Lokasi Penelitian.....	42
3.3 Fokus Penelitian.....	43
3.4 Penentuan Informan	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	48
IV. GAMBARAN UMUM	50
4.1 Desa Gebang Kabupaten Pesawaran.....	50
4.2 Desa Munca Kabupaten Pesawaran	56
4.2.1 Sejarah Desa Munca	56
4.2.2 Potensi Sumber Daya Manusia.....	56

4.3	Desa Hanura Kabupaten Pesawaran	59
4.3.1	Sejarah Desa Hanura	59
4.3.2	Kondisi Geografis Desa Hanura	61
4.3.3	Kondisi Demografi dan Sosial Desa Hanura	62
4.3.4	Kondisi Perekonomian Desa Hanura.....	65
4.4	Gambaran Umum Aplikasi Siskeudes	66
4.4.1	Pengawalan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)	67
4.4.2	Dasar Hukum Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)	69
4.4.3	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	69
V.	HASIL DAN PEMBAHASAN	72
5.1	Proses Pengelolaan Keuangan Desa melalui Siskeude 2.0.5 di Desa Gebang, Munca, dan Hanura	73
5.1.1	Penginputan	74
5.1.2	Proses.....	80
5.1.3	Output	85
5.1.4	Manajemen POAC.....	88
5.1	Efektivitas Keuangan Desa (Siskeudes) 2.0.5 di Desa Gebang, Munca, dan Hanura	98
5.2.1	Keberhasilan Program	98
5.2.2	Ketepatan Sasaran	100
5.2.3	Kepuasan Program.....	101
5.2.4	Tingkat Output dan Input	103
5.2.5	Pencapaian Tujuan.....	104
VI.	KESIMPULAN DAN SARAN	109
6.1	Kesimpulan	109
6.2	Saran	111

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Pengoperasian Siskeudes	8
Tabel 2. IDM Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2023.....	10
Tabel 3. Rincian IDM Kecamatan Teluk Pandan tahun 2023	11
Tabel 4. Pendidikan Perangkat Desa.....	15
Tabel 5. Penelitian Terdahulu	15
Tabel 6. Kerangka Kerja POAC.....	33
Tabel 7. Penentuan Informan	45
Tabel 8. Tata Guna Lahan	51
Tabel 9. Jumlah Penduduk	52
Tabel 10. Mata Pencaharian Penduduk Desa Gebang	53
Tabel 11. Tingkat Pendidikan Masyarakat	54
Tabel 12. Prasarana Kesehatan	55
Tabel 13. Tenaga Kesehatan	55
Tabel 14. Potensi Sumber Daya Manusia	56
Tabel 15. Usia	57
Tabel 16. Pendidikan.....	58
Tabel 17. Mata Pencaharian Pokok.....	59
Tabel 18. Jumlah Penduduk Desa Hanura Menurut Kelompok Umur	62
Tabel 19. Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Hanura	63
Tabel 20. Sarana Ibadah.....	64

Tabel 21. Sarana Pendidikan Desa Hanura	64
Tabel 22. Sarana Umum Desa Hanura	65
Tabel 23. Sarana Perdagangan Desa Hanura	66
Tabel 24. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Gebang 2023	69
Tabel 25. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Munca 2023	70
Tabel 26. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Munca 2023	71
Tabel 27. Kelebihan Siskeudes dan Sebelum Menggunakan Siskeudes.....	82
Tabel 28. Pembaharuan Siskeudes	83

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Infografis Implementasi Siskeudes	10
Gambar 2. Gambaran Realisasi Anggaran.....	13
Gambar 3. Gambaran Buku Kas Umum.....	13
Gambar 4. Contoh Kasus	14
Gambar 5. Kerangka Pikir	40
Gambar 6. Peta Lokasi Desa Gebang	51
Gambar 7. Peta Administrasi Desa Hanura	62
Gambar 8. Log in User Siskeudes	75
Gambar 9. Prosedur Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa	76
Gambar 10. Penyetingan Menu Administrasi.....	77
Gambar 11. Penyetingan Menu Administrasi.....	77
Gambar 12. Struktur POAC Sistem Keuangan Desa.....	92

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada zaman teknologi saat ini dapat dilihat bahwa perkembangan internet semakin pesat dan menjangkau seluruh dunia, penggunaan teknologi komunikasi berbasis internet ini membuat dunia terasa mudah digapai dan bahkan mengaburkan batas-batas antar negara sehingga dapat mengatasi kendala ruang dan waktu. Selain membuat perubahan atas tatanan kehidupan sehari-hari, internet turut mendukung perubahan demokrasi di berbagai negara tak terkecuali Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai macam perubahan salah satunya pola hubungan pemerintah dan publik, dimana dengan mudahnya akses informasi memperbesar masyarakat dalam berpartisipasi dalam pemerintahan.

Berdasarkan visi pemerintah yakni berhubungan dengan antar negara atau antar anggota masyarakat di era mendatang, maka pemerintahan berupaya menciptakan sebuah lingkungan dengan kondusif dalam menghadapi era globalisasi yang sangat pesat. Untuk memperbaiki kinerja birokrasi pemerintahan dan administrasi yang terkenal sangat lambat boros dan fungsional maka diharapkan dengan adanya kemajuan teknologi mengubah kinerja pemerintah yang cepat dan murah serta berorientasi pada proses sehingga terciptalah birokrasi yang lebih efisien. Pengembangan internet yakin bahwa internet akan memperkuat demokrasi dan menyebarkan nilai demokratis yang luas. Adanya akses yang mudah untuk mendapatkan informasi dari internet sangat membantu untuk memberdayakan masyarakat mengimbangi pemerintah dan institusi besar lainnya.

Internet memfasilitasi lebih banyak transparansi pemerintah, Ekspansi infrastruktur teknologi informasi telah berdampak besar pada pelaksanaan tugas pemerintah di berbagai sektor, termasuk layanan publik dan operasi keuangan di daerah regional dan desa. Ini telah dicapai melalui inisiatif inovatif yang bertujuan untuk memajukan teknologi informasi dan komunikasi, seperti penyediaan layanan akses internet. Akibatnya, desa-desa kini dimasukkan ke dalam area layanan telekomunikasi universal, dilengkapi dengan kemampuan internet (desa cerdas), sehingga menutup kesenjangan digital. Teknologi telah berkembang begitu cepat sehingga telah mencapai daerah pedesaan. Saat ini, tidak ada organisasi yang dapat berfungsi atau ada tanpa menggunakan beberapa bentuk teknologi. Dengan menggabungkan teknologi dengan komunikasi, organisasi dapat meningkatkan kinerja mereka dan tetap kompetitif. Pemerintah juga memasuki era baru penyampaian layanan melalui *E-Government*, yang menggunakan teknologi digital untuk memberikan layanan lebih efektif dan efisien.

Otonomi desa adalah keistimewaan, kewajiban, dan yurisdiksi yang diberikan kepada desa, tidak diberikan oleh pemerintah, yang harus dihormati secara universal oleh semua anggota masyarakat. Sebuah kota memiliki sumber daya, uang, dan properti yang dapat dikelola secara otonom untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan. Sebuah desa memiliki wewenang untuk melaksanakan tindakan hukum, baik yang berkaitan dengan hukum publik atau hukum sipil. Sebuah desa adalah kumpulan wilayah yang memiliki otonomi untuk secara bebas mengelola rumah tangga mereka sendiri (Dewanti, 2015). Dalam konteks pemerintahan lokal atau daerah otonom, sebuah desa didefinisikan sebagai unit kedaulatan terkecil yang dipimpin oleh kepala desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa melalui pemilihan umum. Oleh karena itu, desa memiliki batasan yang ditentukan dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola kebutuhan penduduk setempat.

Sehubungan dengan perspektif di atas, kebijakan yang disediakan untuk mempertahankan otonomi desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dirinya sendiri dan mengeluarkan peraturan untuk memastikan kepatuhan dengan kebijakan tersebut. Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014, menguraikan kebutuhan setiap pemerintah desa untuk secara otonom mengelola dan menggunakan sumber daya di dalam wilayahnya agar dapat mengelola pemerintahan secara efektif. Sumber daya ini harus digunakan dengan bijaksana untuk mempromosikan pembangunan desa dan memfasilitasi berbagai proyek infrastruktur yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk pedesaan. Penulis studi ini adalah Aria H dan Giofani Inge, dan studi ini dilakukan pada tahun 2019. Selain menciptakan peluang bagi desa untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan dalam hal keuangan. Uang ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan inisiatif pembangunan, mendukung operasi pemerintah, dan meningkatkan empowerment masyarakat (Lajaba et al., 2022).

Secara umum, administrasi desa dan sumber daya finansial laporan keuangan desa dihadapi oleh masalah yang terus-menerus, termasuk keterlambatan yang sering dalam pengiriman laporan keuangan ke pusat, keterampilan yang tidak memadai di antara tenaga kerja saat ini, alat dan infrastruktur dukungan yang tidak mencukupi, dan ketergantungan berkelanjutan pada metode tradisional untuk persiapan laporan. Dana desa adalah kebijakan yang baru-baru ini diterapkan yang dirancang khusus untuk desa. Namun, ada skeptisisme luas tentang efektivitas kebijakan ini karena kekurangan yang melekat pada aparat pemerintah pedesaan, khususnya dalam hal administrasi keuangan, yang hampir sama dengan pemerintah daerah (Fahri, 2017).

Implementasi Undang-Undang No. 6 di desa ini selaras dengan Program Pembangunan Nasional yang diuraikan dalam Rencana Pembangunan Nasional 2015-2019, yang secara khusus berfokus pada “Pembangunan Indonesia dari pinggiran kota dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI.” Dalam APBN-P2015, dana Desa sebesar Rp 20.776 triliun didistribusikan ke 74.093 desa di seluruh Indonesia. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat di

masa depan, mencapai lebih dari 1 miliar untuk setiap desa. Menurut Pasal 72 Undang-Undang No. 6 tentang Dana Desa, desa bertanggung jawab atas pengelolaan dana yang berasal dari berbagai sumber, termasuk Pendapatan Real Desa, Pendapatan Transfer seperti Alokasi Dana Desa (ADD), bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah/Kota, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi/Negara/kota APBD.

Keuangan desa mencakup nilai moneter dari hak dan kewajiban desa, serta semua aset dan sumber daya, baik dalam bentuk uang maupun produk, yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab desa. Manajemen keuangan desa mencakup berbagai kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, diikuti oleh implementasi, kewirausahaan, pelaporan, dan akuntabilitas yang dilakukan selama tahun fiskal, yang berlangsung dari 1 Januari hingga 31 Desember. Selain itu, diharapkan bahwa administrasi desa akan memiliki otonomi yang lebih besar dalam mengawasi pemerintahan dan berbagai aset alam dalam yurisdiksinya, termasuk administrasi keuangan dan kekayaan masyarakat. Fungsi yang signifikan yang dimiliki desa selalu disertai dengan tanggung jawab yang substansial.

Indonesia Corruption Watch (ICW) melihat peningkatan yang konsisten dalam jumlah kepala desa yang terlibat dalam kasus korupsi terkait dengan uang desa dari 2015 hingga 2018. Pada 2015, total 15 warga desa terlibat sebagai tersangka dalam pelanggaran korupsi. Angka ini meningkat menjadi 61 orang pada 2016, 68 pada 2017 dan 89 pada 2018. Menurut data dari ICW, penyalahgunaan dana desa oleh penduduk desa tersebut mengakibatkan kerugian kumulatif negara sebesar 107,7 miliar rupiah. Sutoto (34), kepala desa Songbledek, Paranggupito, Wonogri, telah diidentifikasi sebagai tersangka dalam penyalahgunaan dana desa dalam anggaran APBDes dari 2013 hingga 2015. Kasus korupsi ini dilaporkan di distrik Wonogiri, khususnya pada tahun 2013 hingga 2017 (Source: Oknum Kades di Wonogiri Terbukti Korupsi Dana Desa news.okezone.com).

Penerapan *e-government* dapat dijadikan sebagai bentuk nyata dari tindakan preventif untuk mencegah tindakan korupsi. Istilah *e-government* sendiri

ramai diperbincangkan baik dalam percakapan sehari-hari maupun di seluruh media komunikasi. Di kalangan masyarakat, maraknya penggunaan media komunikasi berbasis internet telah mempengaruhi dan mendorong mekanisme kerja pemerintah di seluruh negara untuk menyesuaikan kerja dan kinerjanya. Dapat dikatakan *electronic-Government (e-Government)* merupakan bentuk penanganan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang berbasis transparan dan akuntabel (Amrozi et al., 2022). *E-government* terbukti mempermudah terjadinya interaksi timbal balik secara digital, tentunya antara pemerintah dengan masyarakat. Salah satu bentuk *e-government* pembuatan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah (BPKP) bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) untuk membantu pemerintah desa dalam melakukan pelaporan keuangan desa yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa bisa lebih bersih, tertib, efektif dan efisien serta terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Loupatty, 2022).

Untuk secara efektif melaksanakan gagasan akuntabilitas, berbagai sumber daya dan infrastruktur pendukung diperlukan. Pemerintah telah memperkenalkan aplikasi gratis yang disebut Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk membantu desa dalam perencanaan anggaran, arsip, dan mengatur keuangan mereka. Program ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan sumber daya pedesaan. Aplikasi Siskeudes dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam kolaborasi dengan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), bersama dengan Pemerintah, inspektur, lembaga, kementerian negara, dan kementerian keuangan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan alokasi dan penggunaan dana yang disediakan untuk pengembangan desa, dengan tujuan meningkatkan administrasi keuangan desa. Aplikasi ini mencakup semua tahap, dari perencanaan hingga pelaporan tanggung jawab.

Aplikasi Siskeudes mempromosikan keterlibatan masyarakat dalam

administrasi desa dengan meningkatkan transparansi, kemandirian, dan akuntabilitas dalam mengelola pendapatan desa. Selanjutnya, administrasi desa memperoleh kemampuan untuk mendirikan dan mengelola APBDes sendiri secara otonom. Aplikasi Siskeudes telah mengalami beberapa iterasi sejak awal, dengan versi terbaru menjadi 2.0.5 pada 2023. Versi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Diputasi) Nomor 20 Tahun 2018, khususnya Pasal 72, yang memerintahkan untuk membuat laporan komprehensif tentang pengelolaan keuangan desa.

Aplikasi Siskeudes adalah perangkat lunak yang digunakan oleh pemerintah desa untuk mengelola keuangan secara efisien dan menghasilkan laporan komprehensif tentang implementasi laporan APB desa, kegiatan, saldo anggaran, dan alamat keluhan. Aplikasi ini juga sangat bermanfaat bagi masyarakat desa. BPKP dengan teliti mengawasi penggunaan uang desa, memastikan bahwa sistem keuangan desa memfasilitasi akses mudah ke rencana anggaran. Penggunaan dana tersebut dioptimalkan melalui kolaborasi antara BPCP, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas aplikasi Siskeudes dalam mempromosikan tanggung jawab keuangan di antara penduduk desa. Situs web ini adalah bpkp.go.id.

Saat ini, Siskeudes berfungsi sebagai fondasi untuk mengawasi urusan keuangan desa. Ini mencakup kerangka kerja yang komprehensif yang meliputi perencanaan, pelaporan, dan organisasi. Selain itu, ia dilengkapi dengan peraturan dan peraturan pemerintah, serta peraturan menteri yang berkaitan dengan uang desa. Aplikasi Siskeudes saat ini dalam versi 2.0.5, yang dirilis pada 24 November 2022. Versi ini mencakup pembaruan dari versi sebelumnya seperti 2.0.0, 2.0.1, dan 2.0.2. Pembaruan dalam versi 2.0.3 berfokus pada meningkatkan perawatan Covid-19 di desa melalui Pendapatan Desa dan belanja Budget. Selain itu, ia mencakup perbaikan dalam manajemen bencana, tanggapan darurat, dan langkah-langkah jaminan sosial melalui bantuan tunai langsung (BLT) dan Dana Desa. Versi 2.0.5 memperkenalkan fitur baru seperti tagging dan pemantauan aktivitas, yang

membuatnya lebih mudah untuk mencari dan mengumpulkan data. Ini juga mencakup penambahan APBDes dan perbaikan lainnya.

Aplikasi Siskeudes dirancang untuk memfasilitasi administrasi dana keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113 2014, yang menekankan keterbukaan dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan desa. Aplikasi ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pengiriman berbagai dokumen yang berkaitan dengan pembangunan pedesaan, seperti Rencana Pembangunan Pedesaan (Rencana Pengembangan Pertengahan Jangka Panjang), Rencana Pekerjaan Pengembangan Desa (RKP), Dokumen Administrasi, Laporan Kinerja Dewan Pengembangan Perkotaan, laporan kekayaan desa, laporan kinerja dana, dan laporan tingkat pencapaian pemerintah setempat. Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat (nomor distribusi: 143/8350/BPD) pada tanggal 27 November 2015 kepada Gubernur dan Walikota/ walikota. Surat itu menyatakan bahwa desa-desa di Indonesia secara resmi menggunakan aplikasi Siskeudes untuk manajemen keuangan desa, karena itu adalah aplikasi yang disukai pemerintah dan mencegah penggunaan aplikasi pihak ketiga lainnya. Pada 31 Agustus 2016, Komisi Penghapusan Korupsi (KPK) mengeluarkan Nomor Distribusi: B.7508/01/16/16/08/2016 untuk memberi tahu Kepala Desa di seluruh Indonesia tentang manajemen keuangan desa. Ini termasuk persyaratan untuk menggunakan aplikasi Siskeudes untuk mengelola dana desa.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dibangun dengan pendekatan terpadu, termasuk fitur yang ramah pengguna yang sederhana dan mudah dimengerti. Selain itu, aplikasi ini dilengkapi dengan Sistem Kontrol Internal built-in dan disertai dengan Instruksi Implementasi dan Manual Aplikasi. BPKP mendesak APIP untuk secara aktif terlibat dalam Task Unit Pemerintah Daerah untuk implementasi Siskeudes. Untuk mengembangkan kemampuan APIP, BPCP bekerjasama dengan kementerian/agensi dan pemerintah setempat untuk meningkatkan pengawasan keuangan desa melalui bantuan teknis dan Diskusi Focus Group (FGD), serta melakukan pemantauan bersama distribusi dan penggunaan dana desa setiap tiga bulan sekali. Tujuan

utama dari aplikasi Siskeudes adalah untuk memfasilitasi administrasi keuangan desa yang bersih dan transparan, khususnya yang berasal dari dana masyarakat.

Komisi Anti Korupsi (KPK) mendukung keterlibatan aktif Inspektur dalam memantau pengelolaan keuangan desa. Kepala daerah dan kepala desa sering menghadapi masalah hukum terkait pengelolaan keuangan desa. Hal ini karena pemerintahan desa melibatkan pemerintah daerah dan BPKP, yang bertujuan untuk meminimalkan korupsi. Untuk memastikan pengawasan keuangan yang efektif, Aparat Pengawasan Pemerintah Internal (APIP) menggunakan sistem yang disebut aplikasi yang digunakan oleh APIP. Sistem ini menggunakan pendekatan berbasis risiko dan teknik audit yang didukung komputer. Proses pengawasan termasuk mengevaluasi rancangan peraturan desa yang berkaitan dengan APB desa, menilai pengelolaan keuangan desa, dan menilai dokumen laporan akuntabilitas untuk aset desa dan APBDesa. Sistem Siskeudes memiliki menu pengoperasian sebagai berikut:

Tabel 1. Pengoperasian Siskeudes

NO	Menu Pengoperasian	Isi dan Fungsi
1	Data Umum	Pengimputan data pemerintah desa
2	Bidang dan Kegiatan	Memilih dan melakukan penilaian bidang data dan tugas yang akan dilakukan oleh desa yang diperkuat dalam tahun fiskal saat ini, termasuk kualitas seperti kode aktivitas, lokasi, durasi, nama PTPKD, <i>uotput</i> , dan anggaran kegiatan. Mengumpulkan informasi tentang sumber daya keuangan pemerintah setempat. Ini termasuk pendapatan yang dihasilkan oleh administrasi tanah tunai bangsa, pendapatan dihasilkan dari pasar desa, bisnis desa lainnya, penghasilan pribadi, dana desa, alokasi uang desa, dan bantuan keuangan yang diterima dari pemerintah pusat.
3	Pendapatan	
4	Belanja	Pengenalan data pengeluaran dilakukan berdasarkan bidang dan kegiatan yang dilakukan, termasuk pembayaran pendapatan

		dan manfaat tetap, kegiatan operasional kantor desa, kegiatan operasi BPD, aktivitas operasi RT/RW, dan pemeliharaan desa
5	Pembiayaan	Untuk melakukan pencatatan pendapatan pendanaan, termasuk pendapatan yang dihasilkan dari aset desa dan penarikan dana dari rekening cadangan.
6	Pengeluaran Pembiayaan	Melakukan audit data pengeluaran untuk mendanai partisipasi modal desa di Bumdes.
7	Laporan Penganggaran	Mencetak output proses penganggaran APBDesa
8	Postingan APBDes	Melakukan posting data rancangan APBdes awal tahun, dan APBDes perubahan.

Sumber: Petunjuk Pengoperasian Modul Penganggaran bpkp.go.id

Dalam hal ini bagian menu administrasi data pengguna menetapkan pembatasan pada otorisasi untuk menggunakan program untuk mengakses kemampuan yang dapat diakses. Administrator menetapkan pembatasan menu yang dapat diakses oleh pengguna dengan tingkat pengguna supervisor atau operator di aplikasi Siskeudes. Administrator di tingkat distrik/kota mengelola parameter data umum. Administrasi desa dilarang melakukan perubahan atau penambahan apa pun tanpa mendapatkan izin eksplisit dari administrator distrik/kota. Implementasi aplikasi Siskeudes pada tahun 2017 mencakup 33,17 persen atau 24.863 dari 74.954 desa di Indonesia. Pada 31 Desember 2019, penerimaan aplikasi Siskeudes telah meningkat secara signifikan untuk mencakup 95.06 persen dari semua desa di Indonesia. Program Siskeudes versi 2.0 telah didistribusikan di 71.249 desa di 417 distrik/kota, dari total 74.954 kota di 434 distrik / kota.



Gambar 1. Infografis Implementasi Siskeudes

Teluk Pandan telah berhasil membangun sistem perbankan desa yang beroperasi menggunakan aplikasi mobile. Siskeudes bertanggung jawab untuk mengelola beberapa aspek seperti perencanaan desa, data umum, perancangan, dan kewirausahaan. Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran merupakan Kecamatan yang berbatasan dengan Kota Bandar Lampung, yang memiliki 10 desa dengan status IDM yang berbeda seperti yang ditampilkan di tabel bawah ini.

Tabel 2. IDM Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2023

IDM Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2023	
Batu Menyan	Maju
Cilimus	Berkembang
Gebang	Maju
Hanura	Mandiri
Hurun	Maju
Munca	Berkembang

Sidodadi	Maju
Sukajaya Lempasing	Maju
Talang Mulyo	Maju
Tanjung Agung	Berkembang

Sumber: Data Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2023

Berdasarkan kesepuluh desa tersebut penulis mengambil tiga desa perbandingan, yaitu desa Hanura, Gebang dan Munca, terpilihnya desa tersebut dikarenakan selain status IDM yang berberbeda kemudahan akses atau dukungan dari pihak terkait, seperti pemerintahan desa memudahkan proses pengumpulan data dan kerjasama antar pihak terkait serta sebagai perbandingan dimana desa Hanura sudah diberi predikat pada tahun 2018 bahwa desa Hanura desa pintar yang ada dikabupaten pesawaran serta desa munca yang berdekatan dengan perbatasan kota akan tetapi masih di status IDM berkembang, maka dari itu terpilihnya ketiga desa guna menjawab pertanyaan pada penelitian berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

Tabel 3. Rincian IDM Kecamatan Teluk Pandan tahun 2023

Nama Desa	IKS 2023	IKE 2023	IKL 2023	Nilai IDM 2023	Status IDM
Hanura	0,9829	0,9667	0,9333	0,961	Mandiri
Gebang	0,7657	0,6333	0,7333	0,7108	Maju
Munca	0,8171	0,55	0,6	0,6557	Berkembang

Sumber: Berita Acara Pemerintah Kabupaten Pesawaran

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan perkembangan dan kemajuan desa IDM, yang ditandai dengan kemajuan dan kemerdekaan desa Munca, desa Maju Gebang, dan desa Hanura. Status IDM ini ditentukan melalui indeks komposit kuesioner survei, yang terdiri dari tiga indeks: ketahanan sosial (IKS), ketahanan ekonomi (IKE), dan ketahanan ekologis / lingkungan. (IKL). Desa-desa ini berfungsi sebagai model perbandingan untuk manajemen Siskeudes dalam penelitian ini, mewakili tambahan baru ke

sistem manajemen keuangan manual sebelumnya. Dari sudut pandang otoritatif, menjadi salah satu desa yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan desa atau uang yang didistribusikan dari anggaran pendapatan dan pengeluaran nasional (APBN) sangat penting untuk mempertahankan pemerintah desa dan meningkatkan kesejahteraan penduduk desa.

Implementasi kegiatan teknologi informasi dapat menjadi tantangan karena hambatan dapat muncul di semua bagian pendukung. Ini terjadi saat menerapkan sistem keuangan desa (Siskeudes) sebagai komponen dari kerangka kerja *e-government*. Berdasarkan temuan awal penulis, keterbatasan berikut telah diidentifikasi dalam implementasi dan administrasi Siskeudes:

1. Perkembangan penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di desa Gebang, Munca dan Hanura belum sepenuhnya berjalan optimal masih terkendalanya sinyal.
2. Kurangnya sosialisasi dalam pengaplikasian Siskeudes, dan bimbingan teknis dari dinas yang tidak ada.
3. Pada laporan buku kas umum (BKU) berisi penganggaran, terdapat laporan pemasuka dan pengeluaran akan tetapi di Siskeudes tidak *balance* (seimbang) dan terdapat laporan *double* pada penerimaan
4. Siskeudes membutuhkan hardware yang tinggi dan membutuhkan jaringan yang kuat sangat terkendala bagi desa-desa.
5. Siskeudes membutuhkan pengelola atau sumber daya manusia yang mumpuni, baik dari latar belakang pendidikan, skill dan pengalaman khususnya pada desa dengan IDM berkembang.

Berikut temuan permasalahan yang masih ada di aplikasi sistem keuangan desa, pada laporan buku kas umum (BKU) yang berisi penganggaran, terdapat laporan pemasukan dan pengeluaran, akan tetapi di Siskeudes tidak seimbang dan terdapat laporan ganda pada penerimaan.

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GEBANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.055.700.797,00	2.029.511.382,00	26.189.415,00
	4.2.1.	Dana Desa	1.440.977.000,00	1.440.977.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	1.440.977.000,00	1.440.977.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	76.633.625,00	50.444.210,00	26.189.415,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	76.633.625,00	50.444.210,00	26.189.415,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	532.090.172,00	532.090.172,00	0,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	532.090.172,00	532.090.172,00	0,00
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
	4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
		JUMLAH PENDAPATAN	2.055.700.797,00	2.029.511.382,00	26.189.415,00
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.059.851.797,00	1.033.658.172,00	26.193.625,00
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan	881.699.797,00	881.206.172,00	493.625,00
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00

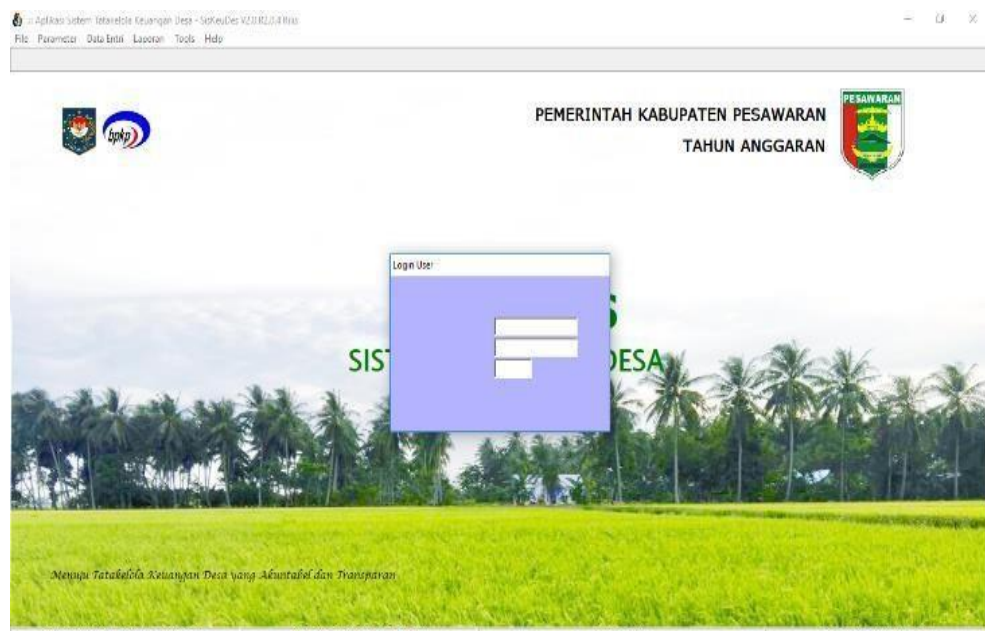
Gambar 2. Gambaran Realisasi Anggaran
Sumber: Pengurus Siskeudes Teluk Pandan

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9																																													
312	31/12/2023	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan PBP Kas di Bendahara	0,00 6.000.000,00	5.000.000,00 6.000.000,00	0143/SPP/10.2003/2023	(5.000.000,00) 0,00	6.006.210,00 6.006.210,00																																													
JUMLAH				4.145.809.991,00	4.139.803.781,00			6.006.210,00																																													
<p>Saldo Kas per tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp 6.006.210,00</p> <p>Terdiri dari :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>a. Tunai</td> <td>Rp</td> <td>5.645.136,00</td> <td>Diverifikasi Oleh,</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">GEBANG, 31 DESEMBER 2023</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b. Bank</td> <td>Rp</td> <td>361.074,00</td> <td>SEKRETARIS DESA</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">KAUR KEUANGAN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>Rp</td> <td><u>6.006.210,00</u></td> <td>AGUSTAM</td> <td>Disetujui oleh,</td> <td></td> <td style="text-align: right;">LESTARI ANGGAR PURWATI</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>KEPALA DESA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">ANIK REKAYANI, S.Pd.I</p>																		a. Tunai	Rp	5.645.136,00	Diverifikasi Oleh,			GEBANG, 31 DESEMBER 2023			b. Bank	Rp	361.074,00	SEKRETARIS DESA			KAUR KEUANGAN			Jumlah	Rp	<u>6.006.210,00</u>	AGUSTAM	Disetujui oleh,		LESTARI ANGGAR PURWATI							KEPALA DESA				
a. Tunai	Rp	5.645.136,00	Diverifikasi Oleh,			GEBANG, 31 DESEMBER 2023																																															
b. Bank	Rp	361.074,00	SEKRETARIS DESA			KAUR KEUANGAN																																															
Jumlah	Rp	<u>6.006.210,00</u>	AGUSTAM	Disetujui oleh,		LESTARI ANGGAR PURWATI																																															
				KEPALA DESA																																																	

Gambar 3. Gambaran Buku Kas Umum
Sumber: Pengurus Siskeudes Teluk Pandan

Berdasarkan data pada buku kas umum (BKU), sering terdapat pencatatan *double* pemasukan dan pengeluaran, tetapi dalam *double* pencatatan tersebut

tidak berpengaruh dengan jumlah saldo, seperti di realisasi anggaran Rp. 2.055.700.797 dan di BKU Rp. 4.145.809.991.



Gambar 4. Contoh Kasus

Sumber: Pengurus Siskeudes Teluk Pandan

Pada gambar di atas menunjukkan adanya kendala dalam *hardware* dan *limit* akses Siskeudes yang mana terjadinya *blank* pada aplikasi siskeudes maka membutuhkan jaringan yang kuat, akan tetapi pada desa- desa yang berkembang kesulitan dalam jaringan, serta SDM yang rendah mengakibatkan kendala dalam pengelolaan Siskeudes, seperti tidak pahami dalam mengakses jaringan. Adanya kendala dalam pengelolaan atau sumber daya manusia yang mumpuni, baik dari latar belakang pendidikan, skill dan pengalaman khususnya pada desa dengan IDM berkembang menjadi salah satu penyebab terkendalanya Siskeudes, sumber daya manusia yang dimaksud ialah perangkat desa di setiap desanya yang memiliki wewenang dalam mengelola Siskeudes.

Berikut menunjukkan latar belakang pendidikan perangkat desa dari ketiga desa Gebang, Munca dan Hanura, yaitu memiliki latar belakang dari SMA sampai Sarjana (S1).

Tabel 4. Pendidikan Perangkat Desa

Nama Desa	Status Desa	Nama	Pendidikan Terakhir
Hanura	Mandiri	Agus Guntoro	SMA
Gebang	Maju	Mukhlis Sholihin	S1
Munca	Berkembang	Muchamad Uci	D3

Sumber: Olahan Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang terkait. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang disajikan oleh peneliti dalam bentuk tabel:

Tabel 5. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Nama	Jenis	Judul
1	Alfiza Eva	2021	Skripsi	Penerepan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Gampong Empee Bata kecamatan Lang Bintang kabupaten Aceh Besar
2	Eka Satyorini	2017	Tesis	Determinan Minat Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskudes)
3	Arif Rivan dan Irfan Ridwan	2019	Jurnal	Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam pengelolaan keuangan desa
4	Lilik Setiawati	2022	Jurnal	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan, Serta Peran Pendampingan Desa Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Studi Pada Desa di Distrik Prafi Kabupaten Manokwari)

Sumber: Olahan Peneliti

Pendekatan penulis berbeda dari penelitian sebelumnya. Dalam studi mereka berjudul "*Siskeudes in Gampong Empee Bata District of Lang Bintang district of Aceh Besar*" peneliti Alfiza (2021) membahas keterbatasan dan tantangan yang terkait dengan implementasi aplikasi Siskeude. Studi kedua, yang dilakukan oleh Eka Setyorini, bertujuan untuk menentukan pengaruh kualitas sumber daya manusia dan faktor sosial pada minat dalam menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Selain itu, studi ini juga bertujuan untuk memeriksa dampak kualitas sumber daya manusia pada minat dalam menggunakan Siskeudes. Studi ketiga, berjudul "*Applications of the Village Financial System in Village Financial Management*" ditulis oleh Arif dan Irfan. Memeriksa implementasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Studi terakhir, berjudul "*Impact on the Quality of Human Resources, Education and Training, and the Auxiliary Role of a Village on the Effectiveness of the Use of the Town's Financial System (Study on a Village in the Manokwari Prefi District District)*" dilakukan oleh badan pengawas. Tujuannya adalah untuk menilai dampak kualitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, dan dukungan yang diberikan oleh sebuah desa pada efisiensi sistem Siskeudes.

Berdasarkan pembeda peneliti terdahulu dan observasi awal yaitu dalam penelitian ini membahas efektivitas pengelolaan Siskeudes di pesawaran teluk pandan khususnya desa Munca, desa Gebang dan desa Hanura yang belum pernah adanya penelitian sebelumnya, serta dapat disimpulkan bahwa ketidakselarasan konsep dengan realitas dalam pelaksanaan sistem keuangan desa sebagai kebaruan dalam tata kelola keuangan desa yang dijalankan oleh pemerintah desa Gebang, Munca dan Hanura masih adanya kendala. Sehubungan dengan indikasi permasalahan yang muncul mejadi daya tarik penulis untuk melakukan kajian secara mendalam dengan topik Efektivitas Pengelolaan Keuangan melalui Sistem Keuangan desa (Siskeudes) 2.0.5 (Studi di Desa Gebang, Munca dan Hanura Kabupaten Pesawaran).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan penelitian yang diuraikan, penulis mengembangkan pemahaman tentang masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengelolaan keuangan desa melalui Siskeudes 2.0.5 di Desa Gebang, Munca, dan Hanura?
2. Bagaimana efektivitas keuangan desa melalui Siskeudes 2.0.5 di Desa Gebang, Munca dan Hanura?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditentukan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji atau menganalisis proses pengelolaan keuangan desa Siskeudes di Desa Gebang, Munca, dan Hanura
2. Untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan desa Siskeudes di Desa Gebang, Munca, dan Hanura

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan terkait dengan efektivitas dan pengelolaan keuangan berbasis *E-government*.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan kepada administrasi Pemerintah Desa Gabng, Munca, dan Hanura mengenai manajemen keuangan desa melalui sistem keuangan desa Siskeudes.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Efektivitas

Efektivitas adalah pencapaian hasil untuk mencapai suatu tujuan. Efisiensi adalah sesuatu yang berpengaruh atau konsekuensinya, berpengaruh, membawa hasil dan membentuk keberhasilan usaha atau tindakan. Supardi (2013:163), efektivitas diartikan sebagai usaha untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana yang baik dalam penggunaan data atau sarana material dan immaterial untuk mencapai hasil kuantitas dan kualitas yang maksimal. Efisiensi mengacu pada kemampuan untuk memilih dan mengejar tujuan yang tepat secara efektif. Efisiensi adalah ukuran seberapa baik hasil yang sebenarnya sejalan dengan hasil yang direncanakan atau diharapkan. Sebuah organisasi dianggap efektif ketika dapat memberikan output yang selaras dengan tujuan yang direncanakan.

Efektivitas merujuk pada pencapaian hasil atau hasil yang diinginkan dalam suatu tindakan atau dalam program yang efisien. The Liang Gie diterbitkan pada tahun 1997. Pencapaian hasil yang ditargetkan, tujuan, atau dampak yang timbul dari tindakan program dapat dilihat dalam skenario khusus ini. Starawaji (2009) juga menyimpulkan bahwa efektivitas mengukur sejauh mana tujuan dicapai. Efisiensi mengacu pada dampak yang disebabkan oleh aktivitas tertentu untuk menentukan tingkat keberhasilan yang diperoleh dalam setiap tindakan yang dilakukan.

Efisiensi mengacu pada keberhasilan mencapai tujuan tertentu, termasuk tujuan, tujuan jangka panjang, dan tujuan keseluruhan bisnis (Ratminto & Atik, 2005: 106). Pernyataan ini menyiratkan bahwa tujuan atau target yang ditentukan sebelumnya berfungsi sebagai kriteria untuk menentukan apakah

tujuan telah berhasil dicapai sesuai dengan rencana atau tidak. Rahman (2017) mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka pendek dan jangka panjang. Artinya efektivitas adalah ukuran standar yang menggambarkan seberapa sukses suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan pengertian di atas secara singkat maka efektivitas ialah ukuran atau hasil yang telah mencapai tujuan

a. Ukuran Efektivitas

Efisiensi berfungsi sebagai metrik untuk mengevaluasi efektivitas rencana dan prosedur sehubungan dengan hasil yang dicapai. Untuk memastikan efektivitas sebuah program, perlu untuk memiliki ukuran efisiensi. Campbell J.P. (1989:121) menyatakan dalam Starawaji (2009) bahwa ada beberapa pendekatan untuk menilai efektivitas keseluruhan, dengan yang paling menonjol adalah:

1. Efisiensi program atau keberhasilan program, dapat dinilai oleh kapasitas operasionalnya untuk melaksanakan program kerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas program dapat dievaluasi dengan memeriksa prosedur dan proses kegiatan yang dilakukan dalam praktek.
2. Penilaian keberhasilan tujuan efisiensi atau keberhasilan sasaran efektivitas didasarkan pada sejauh mana tujuan dicapai dengan menekankan elemen output. Ini berarti bahwa efektivitas dapat ditentukan dengan mengevaluasi penyesuaian tingkat output dengan kebijakan dan proses organisasi sehubungan dengan tujuan yang ditetapkan.
3. Kepuasan adalah ukuran evaluatif dari efektivitas program dalam memenuhi persyaratan pengguna. Kualitas produk dan layanan yang lebih tinggi mengarah pada peningkatan kepuasan pelanggan, yang dapat memberikan keuntungan bagi lembaga.
4. Efisiensi tingkat input dan output terlihat ketika membandingkan input dengan output. Jika output melebihi input, itu dapat

dianggap efisien; sebaliknya, jika input melampaui output, itu bisa dianggap tidak efektif.

5. Pencapaian Tujuan Komprehensif Setiap kali sebuah perusahaan memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap tujuan-tujuannya. Di sini, ulasan komprehensif dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor individu untuk mengukur efisiensi keseluruhan bisnis. Efisiensi suatu program ditentukan oleh kemampuan operasionalnya untuk menerapkan tujuan yang telah ditetapkan secara komprehensif. Pada dasarnya, efektivitas mengacu pada sejauh mana sebuah lembaga dapat mencapai tujuan atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sumber yang disebutkan adalah Campbell (1989: 47).

Situs web dan aplikasi yang efektif ditandai dengan kemampuan mereka untuk memberikan kegunaan yang optimal, memastikan bahwa pengguna dapat dengan mudah menavigasi dan berinteraksi dengan mereka. Usability, seperti yang didefinisikan oleh Nielsen dalam Handiwidjojo (2016) adalah penilaian kualitatif yang mengevaluasi kemudahan dengan mana pengguna dapat berinteraksi dengan antarmuka aplikasi. Sebuah aplikasi dianggap berguna ketika fungsi-fungsinya dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan memuaskan. Efisiensi secara langsung terkait dengan kemampuan pengguna untuk berhasil mencapai tujuan yang diinginkan saat menggunakan perangkat lunak. Efisiensi secara langsung terkait dengan kemampuan pengguna untuk dengan lancar mencapai tujuan mereka. Kepuasan pengguna tergantung pada ketersediaan pengguna terhadap program. Menurut Nielsen dalam Handiwidjojo (2016), hal tersebut dapat diukur dengan menggunakan beberapa komponen:

- a. Pembelajaran mengacu pada tingkat kemudahan dapat digunakan oleh pengguna dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka.

- b. Efisiensi mengacu pada alokasi sumber daya untuk mencapai akurasi dan kelengkapan.
- c. Memorabilitas atau mudah diingat mengacu pada kemampuan pengguna untuk menyimpan dan mengingat materi yang diajukan.
- d. Kesalahan dan masalah keamanan timbul dari frekuensi kesalahan pengguna saat menggunakan aplikasi.
- e. Kepuasan mengacu pada tingkat kepuasan yang dialami oleh pengguna saat menggunakan aplikasi.

PDCA juga dapat disebut sebagai "Shewhart siklus" karena itu pertama kali didirikan oleh Walter Shewhart beberapa dekade yang lalu. Di sisi lain, analisis PDCA lebih sering dikenal sebagai "sykel Deming" ketika disajikan dalam evolusinya. Ini adalah Deming yang bertanggung jawab untuk mempopulerkan penggunaannya dan memperluas penggunaannya, itulah sebabnya hal ini terjadi. Di sisi lain, Deming sendiri selalu menyebut proses ini sebagai siklus Shewhart, yang secara luas dianggap sebagai ayah dari kontrol kualitas statistik. PDCA adalah metode yang berguna yang memungkinkan perbaikan berkelanjutan dilakukan tanpa henti (Tannady, 2015).

Setiap organisasi di seluruh dunia menggunakan PDCA untuk memastikan bahwa itu terus berfungsi dengan normal. Dalam organisasi manajerial, model PDCA berfungsi sebagai dasar manajemen. PDCA terdiri dari empat proses, yang disebut rencana, melakukan, memeriksa, dan bertindak. Berikut ini adalah deskripsi dari masing-masing dari empat tahap ini:

- a. *Plan* termasuk menetapkan tujuan dan menentukan bagaimana untuk mencapainya. Perencanaan dianggap sebagai fungsi paling penting dari manajemen, dan mencakup semua kegiatan yang manajer bertanggung jawab atas. Ketika datang ke perencanaan, manajer fokus pada masa depan.

- b. *Do* adalah proses pelaksanaan yang dilakukan setelah *planning*. Dalam kebanyakan kasus, penyesuaian yang tidak signifikan dilakukan, dan data yang dikumpulkan dari eksekusi modifikasi tersebut dikumpul untuk menentukan dampak dari eksekusi rencana, yang kemudian dievaluasi selama fase *check*.
- c. *Check* memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. Ini membuat perbandingan antara kinerja aktual dan standar yang diberikan. Adalah tanggung jawab manajemen untuk mengambil tindakan perbaikan jika ada kesenjangan besar antara kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan.
- d. *Act* adalah fase di mana penyesuaian terhadap reaksi yang terjadi ketika fase *do* berjalan. Secara umum, fakta bahwa siklus PDCA dapat distandarisasi pada tingkat ini tidak berarti bahwa itu harus dihentikan ketika semua fase berjalan; sebaliknya, sangat penting bahwa sirkuit ini terus berjalan untuk meningkatkan efisiensi sistem manajemen dalam kolaborasi. Adalah perlu untuk membuat perubahan setiap saat untuk menemukan bidang di mana ada kesempatan untuk kemajuan karena tantangan dan peluang baru dapat muncul secara spontan.

b. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu kegiatan berhasil, namun, beberapa pendekatan secara khusus berfokus pada efisiensinya. Pendekatan ini meliputi:

1. Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Seberapa baik sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuannya dapat dinilai menggunakan pendekatan sasaran. Langkah pertama dalam metode evaluasi efisiensi ini adalah untuk menentukan apa tujuan organisasi dan kemudian untuk melacak seberapa baik mereka telah tercapai. Tujuan penting untuk mengevaluasi efektivitas metode ini adalah untuk mencapai "*official goal*"

secara resmi dalam hal hasil maksimum, sementara pada saat yang sama memperhatikan masalah yang timbul dan memusatkan perhatian pada sisi output dari hal-hal, khususnya, seberapa baik program ini bekerja dalam hal mencapai tingkat output yang dimaksudkan.

Pendekatan ini ingin mengukur seberapa baik sebuah lembaga atau kelompok mencapai tujuan yang dinyatakan. Komponen waktu implementasi juga biasanya dimasukkan ketika menghitung efisiensi. Akibatnya, program akan lebih sukses jika elemen waktu selalu hadir dan tujuan dicapai pada saat yang tepat. Jika tujuan sebuah pekerjaan adalah untuk menjual komoditasnya dalam waktu satu minggu dan ia mencapai tujuan itu, maka pekerjaan itu dianggap sukses dari sudut pandang sasaran.

2. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Salah satu cara untuk mengevaluasi kinerja organisasi adalah dengan melihat seberapa baik ia memperoleh berbagai sumber daya yang dibutuhkan. Untuk sebuah organisasi berfungsi dengan baik, ia membutuhkan akses ke berbagai sumber daya dan kemampuan untuk menjaga hal-hal berjalan lancar. Strategi ini didasarkan pada gagasan bahwa sistem organisasi secara intrinsik terbuka terhadap lingkungannya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa lembaga mempertahankan interaksi yang konsisten dengan lingkungan, yang berisi sumber daya yang berharga dan langka.

3. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses mempertimbangkan kesehatan dan efisiensi lembaga internal. Prosedur internal organisasi yang berfungsi dengan baik terkoordinasi dengan baik, dan semuanya berjalan sesuai rencana. Metode ini mengabaikan kekhawatiran lingkungan untuk menganalisis kinerja agensi sehubungan

dengan sumber daya yang tersedia, yang mengungkapkan kesehatan dan efisiensi keseluruhan.

2.2 *E-Government*

E-Government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah, termasuk ponsel, internet, dan jaringan area luas (WAN), untuk mempromosikan interaksi dengan masyarakat, bisnis, dan entitas pemerintah lainnya, seperti yang dinyatakan oleh Bank Dunia. (Wibawa 2009:113). *E-Government*, seperti yang dinyatakan oleh The World Bank Group (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 2010:54), adalah upaya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan layanan publik melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Depkemenfo (Wibawa, 2009:114) menyatakan bahwa Handiwidjojo didefinisikan sebagai layanan publik melalui situs web pemerintah, di mana domain yang digunakan juga menunjukkan domain pemerintah Indonesia. (go.id). Clay G. Weslatt mendefinisikan *E-Government* di situs webnya (15 Agustus 2007) sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan penekanan biaya-efisien dengan penekanannya pada meningkatkan layanan pemerintah untuk publik dan menjaga pejabat bertanggung jawab. Oleh karena itu visi yang dicanangkan juga harus mencerminkan visi bersama dari pada stakholder yang ada misalnya:

- a. Memperbaiki produktifitas dan kinerja operasional pemerintah dalam melayani masyarakatnya
- b. Mempromosikan pemerintah yang bersih dan transparans
- c. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat meluli kinerja pelayanan publik
- d. Menjamin terciptanya penyelengaaan negara yang demokratis;

Mengingat bahwa visi berasal "dari, oleh, dan untuk" komunitas di mana *E-Government* diimplementasikan, garis waktu akan sangat dipengaruhi oleh

infrastruktur dan keadaan khusus untuk komunitas tertentu. Handiwidjojo bertujuan untuk membangun pemerintahan elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Berdasarkan pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi sebagai sarana untuk mengelola sistem pemerintahan secara efisien. Ada hal utama yang dapat kita tarik dari pengertian *E-Government* diatas, yaitu:

1. Penggunaan teknologi informasi (internet) sebagai alat baru
 2. Tujuan pemanfaatannya sehingga pemerintah dapat berjalan secara efektif, efisien dan produktif dalam penggunaan teknologi internet, seluruh proses atau prosedur yang berbelit-belit dapat dipangkas
- a. Tujuan dan Sasaran *E-Government*

E-Government mengacu pada penggunaan internet untuk memfasilitasi operasi pemerintah dan meningkatkan penyediaan layanan publik dengan fokus pada melayani rakyat. Pada dasarnya, tujuan e-government adalah untuk memindahkan fokus dari barisan fisik ke transaksi online, sehingga menciptakan basis klien di internet. Selain itu, *e-government* bertujuan untuk menyediakan layanan tanpa keterlibatan lembaga-lembaga publik dan menghilangkan kebutuhan untuk sistem menunggu yang panjang untuk mendapatkan layanan yang sederhana, hemat biaya, dan efisien. Sehingga tujuan mendasar yang ingin dicapai dari implementasi ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menggunakan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
2. Menetapkan administrasi yang ditandai dengan integritas, keterbukaan, dan keterampilan dalam menangani kebutuhan yang timbul dari transformasi masyarakat.

3. Meningkatkan struktur organisasi, kerangka administrasi, dan prosedur operasional pemerintah. (*Blueprint Sistem Aplikasi E-Government*, 2004:21).

Kemudian selain tujuan dasar tersebut, bahwa *e-government* mempunyai sasaran pembangunan *e-government* sebagai berikut:

1. Pembentukan jaringan informasi yang dapat diandalkan dan efisien biaya dan transaksi layanan publik.
2. Membangun koneksi interaktif dengan sektor bisnis untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan ekonomi untuk beradaptasi dan bersaing di bidang perdagangan internasional.
3. Implementasi protokol komunikasi antara entitas pemerintah dan penyediaan infrastruktur untuk keterlibatan publik dalam proses pemerintahan.
4. Implementasi sistem manajemen dan prosedur operasional yang transparan dan efisien, serta optimalisasi transaksi dan layanan antara lembaga pemerintah (*Blueprint Sistem Aplikasi E-Government* 2004:21)

Situs pemerintah daerah adalah pendekatan strategis untuk secara metodis melaksanakan pertumbuhan *e-government* dengan cara yang praktis dan terukur. Tahap awal pengembangan *e-government* melibatkan penciptaan situs pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan akses yang mudah ke informasi dan layanan pemerintah di tingkat pusat dan regional. Selain itu, situs-situs ini memfasilitasi partisipasi publik dalam proses demokrasi melalui penggunaan platform internet.

b. Manfaat Implementasi E-Government

Secara teoritis manfaat yang diharapkan dengan penerapan *E-Government* (OECD 2005 dalam Satya Darmawan & Respati, (2022: 70), yakni:

1. *E-Government* meningkatkan efisiensi; Pengolahan sejumlah besar tugas administrasi dan operasi menjadi lebih efisien dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pengumpulan dan transfer data, penyediaan informasi, dan komunikasi klien semua dimungkinkan dengan aplikasi berbasis internet. Pertukaran data yang lebih konsisten dan multilateral dapat mengarah pada peningkatan efisiensi di masa depan.
2. *E-Government* meningkatkan pelayanan; Akibatnya, pengguna tidak harus mencoba untuk terlibat dengan pemerintah dengan mencoba memahami jaringan interkoneksi yang rumit, jika pemerintah benar-benar tertarik pada perhatian pengguna. Untuk mencapai tujuan ini, Internet dapat memfasilitasi munculnya pemerintah sebagai organisasi bersatu dan penyediaan layanan online. Sebagai bagian dari strategi layanan berbasis saluran, pemerintah harus membangun layanan elektronik sesuai dengan permintaan dan nilai pengguna.
3. *E-Government* membantu mencapai keluaran kebijakan tertentu. Melalui berbagi informasi dan ide yang dimungkinkan oleh Internet, para pemangku kepentingan dapat membantu dalam pengembangan kebijakan spesifik. Berbagi informasi di sektor kesehatan dapat meningkatkan penggunaan sumber daya dan perhatian terhadap pasien, informasi online dapat menyebarkan penggunaan program pendidikan atau pelatihan, dan berbagi informasi antara pemerintah federal dan negara bagian dapat memfasilitasi kebijakan lingkungan, antara banyak penggunaan lainnya.
4. *E-Government* bisa berkontribusi untuk tujuan kebijakan ekonomi; Penggunaan layanan pemerintah elektronik membantu dalam memerangi korupsi, meningkatkan kepercayaan pada pemerintah, dan memajukan tujuan kebijakan moneter. Akan ada penurunan pengeluaran pemerintah sebagai akibat dari program yang lebih efisien dan efektif, dan peningkatan produktivitas

perusahaan sebagai hasil dari informasi pemerintah yang lebih baik dan kesederhanaan administrasi yang memungkinkan oleh komunikasi dan teknologi informasi.

5. *E-Government* memiliki potensi untuk berkontribusi secara signifikan terhadap upaya reformasi. Teknologi informasi dan komunikasi telah memainkan peran penting dalam mendukung reformasi di beberapa bidang. Mereka telah mencapai ini dengan meningkatkan keterbukaan, memungkinkan pertukaran informasi yang efisien, dan menarik perhatian pada ketidaksempurnaan internal.
6. *E-Government* bisa membantu membantu kepercayaan antara pemerintah dan warga Negara; Pemerintahan yang baik bergantung pada masyarakat yang memiliki kepercayaan pada pemerintah mereka. Dengan penggunaan ICT, orang lebih mampu berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, pemerintah lebih transparan dan bertanggung jawab, dan korupsi kurang mungkin terjadi. Selain itu, *e-government* memiliki potensi untuk membuat pendapat individu menjadi penting dalam diskusi yang lebih luas, asalkan hambatan dan batasan tertentu dapat dihilangkan. Salah satu cara untuk secara metodis melaksanakan pertumbuhan *e-Government* melalui fase yang sangat praktis dan dapat diukur adalah melalui situs pemerintah lokal. Langkah awal dalam mengembangkan sistem *e-government* adalah membangun situs web untuk pemerintah setempat. Ini akan memungkinkan warga untuk mudah mengakses layanan dan informasi pemerintah federal dan regional, dan juga akan memungkinkannya untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan demokrasi melalui media Internet.

Selain manfaat yang sudah disebutkan, ada bukti nyata bahwa beberapa negara yang menerapkan aplikasi *E-Government* melihat peningkatan dalam efektivitas dan efisiensi layanan publik. Ekonomi, sosial, dan

pemerintahan adalah tiga pilar di mana keuntungan e-pemerintah bergantung (Misuraca, 2007: 57–58), yaitu:

1. Dimensi Ekonomi; Dari sudut pandang ekonomi, *e-government* memiliki beberapa keuntungan, seperti biaya transaksi yang lebih rendah untuk layanan yang lebih efisien, penyediaan pelayanan yang lebih baik dalam hal cakupan dan kualitas, responsif terhadap kekhawatiran kemiskinan, dan pendapatan yang lebih tinggi.
2. Dimensi Sosial; *e-government* memiliki beberapa efek sosial positif, termasuk memperluas peluang kerja sektor ketiga, meningkatkan sistem kesehatan dan pendidikan, regulasi yang lebih efektif dari layanan publik, dan kemampuan yang lebih besar untuk memberikan keamanan dan keamanan. Keuntungan ini sering dapat diukur dalam kaitannya dengan negara dan dinilai dari perspektif politik.
3. Dimensi pemerintahan; Dalam hal pemerintahan, *e-government* memiliki potensi untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dengan menjadikannya lebih terbuka, transparan, bertanggung jawab, atau demokratis daripada metode pemerintahan tradisional.

Keuntungan menerapkan *e-government* melampaui aspek ekonomi, sosial, dan pemerintah yang diidentifikasi oleh Misuraca (2007). Beberapa manfaat tambahan dari mengadopsi e-government meliputi perbaikan dalam beberapa dimensi pemerintahan:

1. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kinerja layanan pemerintah untuk keuntungan masyarakat, bisnis, dan industri di seluruh negara.
2. Mengadopsi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dapat membantu membuat manajemen pemerintah lebih terbuka, bertanggung jawab, dan terkendali.

3. Secara signifikan mengurangi seluruh biaya administrasi, hubungan dan interaksi yang dihabiskan oleh pemerintah dan stakeholdernya demi operasi sehari-hari.
4. Memberikan pemerintah kesempatan untuk terlibat dengan pemangku kepentingan dan mungkin memperoleh aliran pendapatan baru.
5. Mengingat banyak tren dan perkembangan saat ini di skala global, membangun pengaturan komunitas baru yang mampu merespon dengan cepat dan efektif terhadap banyak tantangan yang ada.
6. Mempromosikan proses adopsi kebijakan yang adil dan demokratis dengan melibatkan masyarakat dan kelompok-kelompok yang berkepentingan lainnya sebagai mitra pemerintah.
7. Membangun komunitas berbasis informasi yang kuat dan berkualitas tinggi (Indrajit, 2005: 4).

2.3 Teori Organisasi

Teori organisasi adalah konsep dan kerangka kerja yang digunakan untuk memahami struktur, proses, dan perilaku organisasi. Dalam konteks sistem keuangan desa, beberapa teori organisasi yang dapat diterapkan termasuk Teori Sistem Terbuka Menganggap organisasi sebagai suatu sistem yang terbuka, menerima input dari lingkungannya, memprosesnya, dan menghasilkan output. Teori sistem adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan menganalisis berbagai fenomena kompleks dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu manajemen dan organisasi. Dalam konteks teori organisasi, pendekatan sistem memandang organisasi sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan bersama. Beberapa konsep kunci dalam teori sistem yang relevan untuk teori organisasi melibatkan pemahaman tentang bagaimana komponen organisasi berinteraksi dan

beradaptasi satu sama lain. Berikut adalah beberapa elemen utama dari teori sistem dalam konteks teori organisasi:

- a. **Komponen Organisasi**
 1. **Input (Masukan):** Merupakan sumber daya yang masuk ke dalam sistem organisasi, seperti manusia, modal, dan informasi.
 2. **Proses (Proses):** Merupakan aktivitas yang dilakukan dalam organisasi untuk mengubah input menjadi output.
 3. **Output (Keluaran):** Hasil dari proses yang mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks aplikasi keuangan desa, ini dapat membantu dalam memahami bagaimana sistem keuangan desa berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya.
 4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya adalah peran utama POAC. Setiap komponen dari POAC diuraikan secara singkat di bawah ini:
 - a. *Planning* meliputi pengaturan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Segala sesuatu yang ditangani manajer jatuh di bawah payung perencanaan, yang telah lama dipikirkan sebagai peran utama manajemen. "Ini adalah apa yang kita inginkan dan bagaimana kita akan melakukannya." adalah cara manajer melihat ke depan saat merencanakan. Karena setiap opsi tergantung pada proses penyelesaian setiap rencana, membuat pilihan sering menjadi elemen perencanaan. Ada banyak bagian bergerak dalam tanggung jawab manajemen lainnya, dan perencanaan adalah salah satunya. Sebagai contoh, diharapkan bahwa semua manajer dalam organisasi membuat rencana pekerjaan yang efektif.
 - b. *Organizing* adalah proses koordinasi alokasi sumber daya manusia dan fisik untuk secara efektif menerapkan rencana dan mencapai tujuan organisasi. Menentukan siapa yang memiliki wewenang untuk melakukan banyak pekerjaan, memecah pekerjaan menjadi bagian komponennya, dan mengalokasikan setiap tindakan adalah bagian dari proses *Organizing*.

Kelompokkan tugas ke dalam departemen atau subdivisi lainnya adalah fitur penting lainnya dari organisasi. Personalisasi adalah salah satu contoh seperti itu; itu adalah cara untuk menjamin bahwa organisasi memiliki orang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuannya. Menyewa seseorang untuk melakukan pekerjaan adalah tindakan sosial yang umum. Memisahkan komunikasi dari organisasi adalah cara umum untuk mengkategorikan upaya besar ini.

- c. *Actuating* adalah tugas manajer untuk bertindak dengan mengarahkan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Berbeda dengan berorganisasi dan merencanakan, bertindak adalah melaksanakan strategi. Ketika rencana diaktifkan, itu menempatkan urutan rencana ke dalam tindakan di dunia nyata organisasi. Rencana, maka, akan tetap seperti itu rencana jika tidak ada langkah-langkah konkret yang diambil untuk membuatnya menjadi kenyataan.
- d. *Controlling* menjaga semuanya berjalan lancar dan sesuai jadwal. Ini memeriksa kinerja nyata terhadap benchmark yang telah ditentukan sebelumnya. Manajemen berkewajiban untuk memperbaiki situasi jika ada perbedaan yang signifikan antara kinerja yang diharapkan dan yang sebenarnya. Meningkatkan upaya pemasaran untuk meningkatkan pendapatan. Melihat meninjau hasil kinerja selama periode ini, tujuan *controlling* adalah untuk memastikan apakah rencana asli membutuhkan revisi. Berdasarkan hasil *controlling*, seorang manajer akan kembali ke proses perencanaan dan merancang rencana baru jika ia melihat kebutuhan untuk perubahan..

Jika mengadopsi istilah POAC sebagai *Plan-Organize-Act-Control*, dikaitkan dengan buku modul pedoman sistem keuangan desa maka *Planning* berada di Modul Perencanaan, *Organizing* terletak di modul penganggaran, *Actuating* pada model penatausahaan dan *Controlling* modul Pelaporan dapat dilihat dari tabel 5:

Tabel 6. Kerangka Kerja POAC

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PLANNING	ORGANIZING	ACTUATING	CONTROLLING
1	Perencanaan	1. Data Umum Desa 2. Visi & Misi Desa 3. Laporan Perencanaan	Menetapkan perencanaan tujuan pengelolaan keuangan desa, mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan	Menetapkan peran, tanggung jawab, dan wewenang dari setiap individu atau kelompok yang terlibat dalam perencanaan pada manajemen keuangan desa	Melaksanakan rencana berdasarkan data umum desa, visi-misi yang telah disusun	Memastikan bahwa proses Perencanaan keuangan desa berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun.
2	Penganggaran	1. Kegiatan 2. Pendapatan 3. Belanja 4. Pembiayaan 5. Laporan Penganggaran	Identifikasi langkah-langkah konkret yang diperlukan dalam menyusun anggaran pada pengelolaan keuangan desa	Pembentukan PPKD yang bertanggung jawab atas penganggaran keuangan desa pada masing-masing kegiatan	Melakukan proses input penganggaran secara akurat dan teratur sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan	Melakukan pelaporan secara berkala terkait penganggaran yang dilakukan
3	Penatausahaan	1. Penerimaan Desa 2. Pengeluaran Desa (SPP) 3. Pencairan SPP Kegiatan 4. Penyetoran Pajak 5. Mutasi Kas 6. Penyetoran Pajak 7. Laporan Penatausahaan	Merencanakan struktur sistem penatausahaan yang mencakup bagaimana pencatatan keuangan akan dilakukan	Membuat rencana yang terperinci tentang bagaimana pencatatan keuangan akan dilakukan, prosedur yang harus diikuti, dan siapa yang bertanggung jawab atas setiap langkah dalam penatausahaan	Memulai proses pelaksanaan atau penggunaan dana sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam rencana anggaran	Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan
4	Pelaporan	1. Saldo Awal	Merencanakan jenis laporan keuangan apa	Pelaporan dilaksanakan oleh kaur keuangan desa	Melaksanakan pada setiap proses baik dari	Melakukan pemantauan terhadap proses

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PLANNING	ORGANIZING	ACTUATING	CONTROLLING
			yang akan disusun, kapan laporan tersebut akan dibuat	sebagai petugas kebendaharaan desa	perencanaan, penganggaran maupun penatausahaan pada pengelolaan keuangan desa	pelaporan keuangan, termasuk mengevaluasi keefektifan proses, ketepatan waktu penyusunan laporan, dan kualitas informasi yang disampaikan dalam laporan.

Sumber: Olahan data

2.4 Sistem Keuangan Desa

a. Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menetapkan bahwa keuangan desa mencakup semua hak dan kewajiban moneter, serta semua aset atau barang yang terkait dengan pelaksanaan hak dan tanggung jawab desa. Manajemen keuangan desa mencakup seluruh operasi yang terkait dengan perencanaan, implementasi, terlibat dalam upaya kewirausahaan, pelaporan, dan menganggap tanggung jawab keuangan dalam sebuah desa. Manajemen keuangan desa harus mematuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Berikut merupakan Asas- asas Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu:

1. **Transparan**, konsep transparansi memastikan bahwa publik memiliki akses bebas ke semua data keuangan yang relevan yang berkaitan dengan desa. Sesuai dengan persyaratan hukum, yayasan yang terbuka terhadap hak rakyat untuk mengetahui informasi yang akurat, tidak diskriminatif tentang pemeliharaan pemerintah desa.
2. **Akuntabel** yaitu perwujudan untuk mewujudkan pertanggung jawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan dan menegakkan peraturan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Prinsip pertanggungjawaban menyatakan bahwa semua tindakan yang diambil oleh pemerintah desa dan hasilnya harus dapat dijelaskan kepada penduduk desa dengan cara yang sesuai dengan semua aturan dan peraturan yang berlaku.
3. **Partisipatif** yaitu berarti bahwa anggota masyarakat desa dan lembaga desa terlibat dalam proses pelaksanaan pemerintahan desa.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran yang berkaitan dengan administrasi keuangan desa, harus mematuhi aturan atau norma yang mendasarinya.

b. Sejarah dan Pengawasan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Pengembangan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagai tanggapan terhadap pertanyaan 70 dari Sidang Pendapat Komisi ke-XI (RDP) pada 30 Maret 2015, yang mencari informasi mengenai kepastian waktu penyelesaian aplikasi yang dibangun oleh BPKP dan di samping memenuhi rekomendasi KPK-RI untuk membangun sistem keuangan desa dalam kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, aplikasi tersebut diluncurkan pada 13 Juli 2015.

Pada Mei 2015, aplikasi pengelolaan keuangan desa pertama kali dibangun sebagai proyek pilot di lingkungan BKKP oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat. Pada bulan Juni 2015, Pemerintah Daerah Mamasa adalah yang pertama menggunakan program ini. Setelah aplikasi telah melewati tahap Quality Assurance (QA), tim yang ditugaskan akan mengirimkannya ke Deputy Kepala Pengawasan Manajemen Keuangan Regional BPKP, yang kemudian akan menentukan keberhasilan aplikasi. *BPKP Regional Centre Jakarta Deputy Supervisory Branch for Financial Maintenance* telah mengambil tanggung jawab penuh atas pengembangan aplikasi keuangan desa pada tanggal 13 Juli 2015.

Aplikasi keuangan desa menggunakan database Microsoft Access, yang meningkatkan portabilitas dan memfasilitasi implementasinya, bahkan untuk pengguna aplikasi publik. Dari sudut pandang teknis, transaksi

keuangan desa dikategorikan menjadi kelompok skala kecil. Oleh karena itu, lebih cocok untuk mengelola mereka secara efisien menggunakan database akses ini. Penggunaan database SQLServer dalam aplikasi ini terbatas pada tugas-tugas tertentu atau ketika volume transaksi mencapai ukuran yang substansial. Penggunaan aplikasi keuangan desa harus mendapatkan persetujuan dari BPKP selaku pengembang aplikasi. Permintaan untuk menggunakan aplikasi ini dapat dibuat kepada Perwakilan BKKP setempat oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan proses pengajuan aplikasi sehingga dapat diterapkan ke seluruh desa di bawah pemerintah daerah yang relevan. Kode validasi dan sms resmi dari pemerintah lokal yang disediakan oleh BPKP diperlukan untuk persetujuan penggunaan aplikasi.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Otoritas Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BPKP diberi tanggung jawab untuk mengawasi akuntabilitas keuangan dan pengembangan nasional. Ini termasuk mengelola keuangan desa-desa, khususnya melalui implementasi sistem keuangan desa, dengan tujuan berikut:

1. Tujuan, memastikan seluruh pemerintah dapat secara efektif melaksanakan semua kebijakan dan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Desa, terutama yang terkait dengan pengembangan keuangan dan desa. Pemerintah desa dapat melakukan siklus manajemen keuangan desa dengan cara yang bertanggung jawab, dimulai dengan perencanaan dan berakhir dengan pengawasan dan pelaporan.
2. Ruang Lingkup, Kebijakan keuangan dan pembangunan desa beserta implementasinya. Tahap pertama yang dilakukan sebelum melakukan pengawalan pengelolaan keuangan desa, dapat diidentifikasi titik-titik kritis di tingkat pemerintahan maupun dalam proses pengelolaan keuangannya, sebagai berikut:

Tingkat Pemerintah Pusat:

1. Koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Keuangan.
2. Sinkronisasi Peraturan Pelaksanaan antarKementerian.
3. Peraturan Pelaksanaan yang belum mendukung, misal Perpajakan dan PBJ.

Tingkat Pemerintah Provinsi:

1. Pembinaan dan Pengawasan
2. Fasilitasi pendampingan

Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota:

1. Kebijakan penghitungan alokasi: Dana Desa (APBN), Alokasi Dana Desa (APBD Kabupaten/Kota) dan Bagi Hasil Retribusi/Pajak Daerah
2. SDM (Kecamatan, Inspektorat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)
3. Kebijakan PBJ Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa.

Tingkat Pemerintah Desa:

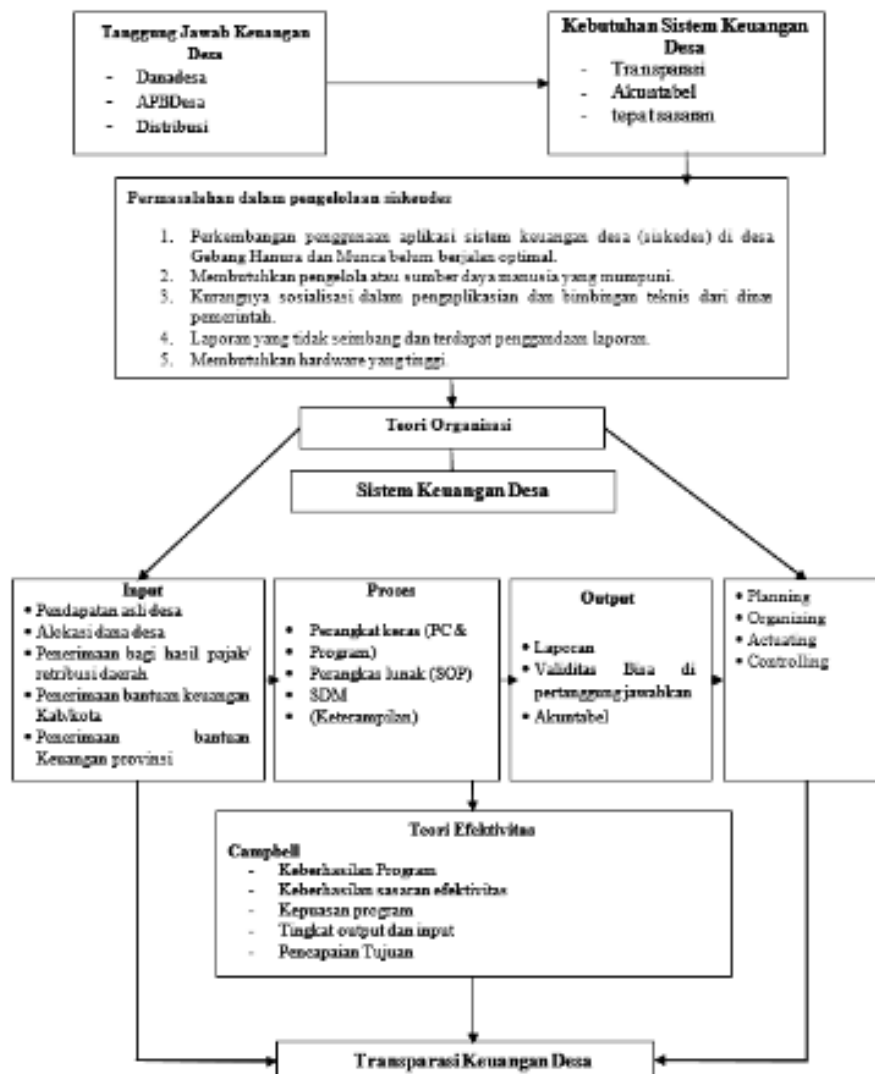
1. SDM Kepala Desa, perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
2. Sarana dan Prasarana Desa
3. Kebijakan tingkat Desa

2.5 Kerangka Pikir

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2018 tentang Manajemen Desa dan pasal 72 tentang Laporan Akuntabilitas Keuangan Desa, masyarakat umum dapat menerima informasi. Selain itu, Pemendagri No. 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan di komunitas desa, setiap administrasi desa diharapkan secara otonom mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di dalam desa mereka. Sumber daya ini harus digunakan dengan bijaksana untuk memastikan dampak positifnya pada pembangunan desa dan memungkinkan implementasi berbagai proyek yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk pedesaan. Selain menciptakan peluang bagi desa untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan dalam hal keuangan. Oleh karena itu, pemerintah telah memperkenalkan aplikasi gratis yang dikenal sebagai Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), yang saat ini sedang dalam pengembangan. Aplikasi ini memfasilitasi proses perencanaan anggaran dan arsip untuk desa, sementara juga mengatur urusan keuangan mereka untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya pedesaan. Aplikasi Siskeudes dibuat oleh *Financial and Development Supervisory Authority* (FDP) dalam kemitraan dengan pemerintah, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Tujuannya adalah meningkatkan alokasi dan penargetan dana desa untuk pengembangan desa, dengan tujuan meningkatkan kualitas pemerintahan keuangan di tingkat desa, dari tahap perencanaan hingga pengajuan laporan akuntabilitas.

Aplikasi Siskeudes dapat menjadikan masyarakat lebih aktif dalam mendukung pemerintahan desa mengatur pendapatan desa yang lebih terbuka & berdikari serta bertanggungjawab, akan tetapi nyatanya di lapangan khususnya di desa Gebang, Munca dan Hanura masih terkendalanya aplikasi siskeudes baik dari aplikasi, jaringan maupun perangkat desa yang kurang sosialisasi dalam penggunaan Siskeudes, mengacu dari rumusan masalah mengenai proses dalam sistem Siskeudes apakah Siskeudes ini berjalan

efektif atau tidak serta melihat transparansi keuangan desa dari model desa mandiri, maju, dan berkembang.



Gambar 5. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Secara Etimologi, istilah "penelitian" berasal dari kata Inggris *research*, yang berarti menemukan kembali. T. Hillway (1964) dalam buku *Introduction to Research*, penelitian didefinisikan sebagai survei yang dilakukan oleh individu melalui pemeriksaan yang teliti dan sempurna dari suatu masalah, dengan tujuan akhir memperoleh jawaban yang tepat terhadap masalah tersebut. Menurut Parson (1994), penelitian adalah pencarian metodis untuk solusi masalah. Teknik penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi postpositivisme atau enterpretatif, yang menganggap realitas sosial sebagai sesuatu yang terintegrasi, kompleks, dinamis, bermakna, dan gejala dalam sifat interaktif.

Penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah. Penelitian yang melibatkan objek alam melibatkan mempelajari objek dalam keadaan alami mereka, tanpa manipulasi atau campur tangan dari peneliti. Para peneliti memainkan peran penting dalam mengamati dan mendokumentasikan objek, yang mengarah pada data kualitatif. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode induktif dan kualitatif, dan hasil dari jenis penelitian ini berguna untuk memahami makna, menemukan keunikan, membangun fenomena, dan menguji hipotesis. Menurut Moleong (2007) metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari kata-kata tertulis atau berbicara orang atau dari perilaku yang diamati (Moleong, 2010). Penelitian kualitatif merupakan penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman alami tentang fenomena dalam konteks sosial melalui meningkatkan koneksi peneliti-fenomena dan

komunikasi yang mendalam.

Tanzeh (2006) berpendapat bahwa metode penelitian kualitatif lebih disukai karena sejumlah alasan, termasuk adaptabilitas mereka untuk konteks yang berbeda, representasi langsung dari dinamika peneliti-informant, dan sensitivitas metode terhadap sistem nilai peneliti sendiri dan informan. Untuk memahami sistem manajemen, prosedur, dan hasil di desa-desa Siskeudes Hanura, Munca, dan Gebang, peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Untuk mencapai tujuan ini, teknik-teknik penelitian yang tepat secara kualitatif dan mempertimbangkan kemungkinan pengumpulan data dari wawancara dan studi mendalam tentang fakta di lapangan. Peneliti secara aktif terlibat dalam mengumpulkan data dari lapangan, strategi akan lebih mungkin untuk memberikan hasil yang terperinci. Sebagai sarana utama untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan objek penelitian, peneliti memiliki peran sentral dalam penelitian kualitatif.

3.2 Lokasi Penelitian

Moleong (2017) menyatakan bahwa peneliti sebagian besar melakukan penelitian di situs item penelitian untuk menangkap fenomena atau kejadian nyata untuk tujuan mendapatkan data penelitian yang dapat diandalkan. Penempatan lokasi penelitian sangatlah penting, karena berguna untuk mempertanggungjawabkan data yang diperoleh dan memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran khususnya Desa Gebang, Munca dan Hanura, di pilihnya desa Gebang, Munca dan Hanura dikarenakan berjalan dan terkordinasi aplikasi Siskeudes di desa tersebut, serta sebagai pembanding dikarenakan status Desa Hanura yaitu desa pintar, agar menjawab segala rumusan masalah yang telah di buat, lokasi yang pilih menyediakan data yang diperlukan untuk peneliti. Selain itu, mempertimbangkan tingkat aksesibilitas ke lokasi tersebut agar memudahkan

pengumpulan data dan pelaksanaan penelitian, pemilihan lokasi penelitian ini agar memastikan bahwa penelitian ini memiliki validitas.

3.3 Fokus Penelitian

Adapun Fokus penelitian yang diambil untuk menjawab pertanyaan pertama mengenai proses ialah:

1. *Input* (Masukan): sumber daya yang masuk ke dalam sistem organisasi, seperti manusia, modal dan informasi
2. Proses (Proses): mengenai memasukkan laporan ke sistem keuangan desa, untuk mengubah input menjadi output
3. *Output* (Keluaran): hasil dari proses yang mencapai tujuan, dalam konteks aplikasi keuangan desa, ini dapat membantu dalam memahami bagaimana sistem keuangan desa berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya
4. Peran POAC: mengenai *Planning, Organizing, Actuating dan Controlling*

a. Efektivitas

Moleong (2014) mendefinisikan fokus penelitian sebagai topik utama yang menerima penekanan utama dalam sebuah penelitian. Memilih topik studi adalah langkah penting dalam metode kualitatif. Investigasi kualitatif didasarkan pada persepsi seseorang tentang suatu masalah, bukannya dimulai dari keadaan kekosongan atau tidak adanya masalah. Adapun fokus penelitian yang diambil dalam penelitian ini, yaitu:

1. Keberhasilan program dengan indikator operasional program kerja sesuai tujuan dan proses dan mekanisme kegiatan
2. Keberhasilan sasaran efektivitas ditinjau dari *output* yang dihasilkan dan prosedur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
3. Kepuasan terhadap program yang dirasakan oleh para pengguna terhadap kualitas produk atau jasa yang dihasilkan

4. Tingkat *output* dan *input* meliputi perbandingan antara masukan dan keluaran
5. Pencapaian tujuan meliputi kemampuan operasional dalam melaksanakan program yang sesuai dengan tujuan dan mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

3.4 Penentuan Informan

Arikunto (2010) menggunakan strategi tujuan untuk menentukan informant untuk penyelidikan ini. Sampling bertujuan adalah strategi penelitian yang digunakan ketika peneliti memiliki kriteria atau kategori tertentu dalam pikiran untuk memilih sampel berdasarkan karakteristik masalah penelitian. Misalnya, individu yang memiliki tingkat keahlian tertinggi dalam bidang tertentu dapat sangat memfasilitasi penyelidikan peneliti tentang subjek atau keadaan yang sedang dipelajari. Proses pemilihan objek penelitian atau informan harus diikuti oleh karakterisasi yang menyeluruh dan didukung oleh pertimbangan akademis untuk memastikan akurasi dalam penargetan. Spardly dan Faisal (1990) menemukan bahwa informant dalam penelitian kualitatif sering memiliki ukuran sampel yang lebih rendah dibandingkan dengan bentuk studi lainnya. Penentuan informan dalam penelitian ini didasarkan atas yaitu para perangkat desa Gebang, Munca dan Hanura dalam membantu pengoprasian Siskeudes, dan masyarakat guna melihat transparansi dari Siskeudes ini, terdapat sembilan informan yang akan diambil dalam penelitian.

Tabel 7. Penentuan Informan

No	Desa	Jabatan	Informan
1	Gebang	Kaur Keuangan (merangkap operator)	Lestari Anggar
		Kaur Perencanaan (merangkap operator)	Mukhlis Solihin
		Masyarakat	Herdi
2	Munca	Kaur Keuangan (merangkap operator)	Muhammad Uci Yeni Suita Asmara
		Sekretaris (merangkap operator)	Yudi Aprianto
		Masyarakat	Yanto
3	Hanura	Kaur Keuangan (merangkap operator)	Satriani
		Masyarakat	Yanto

Sumber: Olahan Data

Dijelaskan pada penentuan informan bahwa kaur keuangan, kaur perencanaan dan sekretaris desa, sesuai dengan penjelasan mereka juga merangkap sebagai operator Siskeudes di desanya masing-masing.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang komprehensif, obyektif, dan dapat diperiksa yang selaras dengan temuan penelitian. Para peneliti menggunakan beberapa cara pengumpulan data dalam studi lapangan untuk memperoleh data, fakta, dan informasi yang relevan. Patton (2009) mengkategorikan jenis dan metodologi pengumpulan data menjadi tiga kategori yang berbeda yaitu:

- a. Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam (*indepthinterview*).

- b. Data yang diperoleh melalui pengamatan (*observation*). Data observasi memberikan representasi lapangan dalam bentuk sikap, perilaku, diskusi, dan interaksi interpersonal.
- c. Dokumen berupa material tertulis yang tersimpan. Dokumen dapat berupa memorabilia atau korespondensi. Ada juga dokumen yang berupa audiovisual. Dokumen berupa materi tertulis (Raco, 2010).

Proses pengumpulan data dan informasi pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode

- 1. Observasi adalah proses mengumpulkan data dengan mengamati objek penelitian. Dalam situasi ini, pengamatan dapat dikategorikan menjadi dua metode, yaitu:
 - a. Observasi adalah fungsi ganda dari seorang pengamat yang bersamaan bertindak sebagai pengamat dan anggota resmi dari kelompok yang diamati.
 - b. Pengamatan tanpa serta pengamat, yakni pengamat hanya berfungsi mengadakan pengamatan.

Peneliti menggunakan observasi non-partisipan. Pengamatan non-partisipan adalah pendekatan penelitian di mana peneliti hanya mengamati tanpa secara aktif berpartisipasi dalam aktivitas yang dipelajari, terlepas dari apakah kehadiran mereka diakui atau tidak (Kriyantono, 2014). Pada penelitian ini melibatkan melakukan kegiatan observasi untuk memeriksa kondisi aktual suatu peristiwa atau peristiwa untuk menangani pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan manajemen keuangan. Selama proses observasi, para peneliti memeriksa berbagai aktivitas, peristiwa, dan situasi atau atmosfer spesifik yang secara langsung terkait dengan efisiensi siskeudes di desa-desa Gebang, Munca dan Hanura Kecamatan Teluk Pandan.

Peneliti berperan dalam mengumpulkan data dan informasi penelitian di lapangan tentang efektivitas pengelolaan keuangan dalam sistem keuangan desa, mempunyai tujuan untuk mengetahui sudah efektif atau

belum dalam pengelolaan aplikasi Siskeudesny dan apakah terdapat kendala yang dihadapi dalam pengelolaan atau pengeoprasian. Berkenaan dengan metode observasi ini, peneliti melakukannya melalui peninjauan lokasi penelitian agar bisa mendapatkan data dan informasi secara langsung dan relevan dengan melangsungkan wawancara dengan pihak yang bersangkutan.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah bentuk pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Secara umum, wawancara mendalam mengacu pada metode untuk mengumpulkan data penelitian melalui wawancaranya secara langsung antara responden dan responden. Proses ini melibatkan mengajukan pertanyaan dan menerima jawaban, dengan atau tanpa penggunaan panduan wawancara. Interviewer dan interviewee terlibat dalam interaksi sosial yang relatif panjang (Devania, 2015). Metode wawancara mendalam atau *indepth interview* ini digunakan untuk mewawancarai perangkat desa gebang. Metode ini digunakan untuk menggali informasi mengenai efektivitas dalam pengelolaan siskeudes di desa Gebang, Munca dan Hanura. Metode wawancara ini peneliti lakukan dengan mewawancarai informan ialah Muhammad Uci, Yeni suite dari operator desa Munca, Lestari Anggar dan Mukhlis Solihin operator Desa Gebang, Satriani dan Yudi aprianto operator desa Hanura

3. Dokumentasi

Sebagaimana didefinisikan oleh Sugiyono (2015) dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, kertas, tulisan numerik, dan fotografi yang terdiri dari laporan dan deskripsi, yang dapat berfungsi sebagai bantuan penelitian. Dokumentasi berfungsi untuk mengumpulkan data dan kemudian melakukan analisis. Penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang telah dirumuskan atau didapat terkait dengan efektivitas, penyebab dan dampak dari pengelolaan dalam sistem keuangan desa, seperti bentuk foto saat

wawancara, serta sumber lainnya yang dapat menjadi penunjang penelitian. Dokumentasi pada penelitian ini dilangsungkan melalui eksplorasi sejumlah dokumen, tercakup tentang lokasi desa, seperti asal mula didirikannya, visi misi dan struktur pemerintahan.

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

pengelolaan data adalah proses mengatur data menjadi informasi untuk memfasilitasi pemahaman tentang fitur atau atributnya, dan untuk membuatnya berguna untuk memecahkan masalah terkait penelitian. Moleong (2007) mendefinisikan analisis data sebagai pengaturan sistematis dan klasifikasi data menjadi pola yang berbeda dan deskripsi fundamental, dengan tujuan mengidentifikasi tema dan merumuskan hipotesis berdasarkan data yang diamati. Pada penelitian ini, pemrosesan data tidak diperlukan untuk dilakukan setelah pengumpulan data atau pada saat penyelesaian pengolahan. Dalam skenario ini, data sementara yang dikumpulkan dapat diproses dan dianalisis bersamaan dengan data yang ada. Selama fase analisis data, ia memiliki kemampuan untuk mengunjungi kembali bidang untuk memperoleh data tambahan yang dianggap penting dan kemudian memprosesnya kembali. Dalam penelitian kualitatif, Suyanto (2006) menjelaskan bahwa pengolahan data melibatkan klasifikasi sistematis atau kategorisasi data menjadi beberapa tema, tergantung pada topik utama penelitian.

Penelolan dan analisis data dalam penelitian ini mencakup tahap-tahap berikut:

1. Reduksi data adalah proses penyemprotan informasi dengan memilih elemen penting, memprioritaskan aspek penting, mengidentifikasi tema dan pola yang berulang, dan menghilangkan detail yang tidak perlu. Oleh karena itu, data kondensasi akan memberikan representasi yang lebih jelas dan memfasilitasi peneliti dalam melakukan lebih banyak pengumpulan dan pencarian data (Sugiyono, 2010).

2. Penyajian Data, menurut Miles & Huberman (1992) mengatakan bahwa setelah data telah dikondensasi, fase berikutnya melibatkan presentasi data. Organisasi data menjadi seperangkat informasi terstruktur memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan implementasi tindakan. Presentasi data berfungsi untuk meningkatkan pemahaman subjek dan berfungsi sebagai dasar untuk membuat keputusan yang didasarkan pada analisis data yang diukur. (Sugiyono, 2010).
3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan, menurut Miles & Huberman (1992) menyatakan bahwa langkah ketiga setelah presentasi data melibatkan membuat kesimpulan dan memverifikasi mereka. Temuan pertama bersifat sementara dan dapat ditinjau kembali sampai bukti yang meyakinkan ditemukan untuk mendukung putaran pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan yang berasal dari penelitian kualitatif memiliki potensi untuk menangani masalah yang ditetapkan pada awalnya, tetapi ada juga kemungkinan bahwa mereka mungkin tidak, karena masalah dan formulasinya dalam penelitian kuantitatif masih sementara dan dapat berubah setelah studi lapangan (Sugiyono, 2010).

Pada penelitian ini, data yang diproses dari prosedur yang disebutkan di atas kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang adil dan komprehensif. Temuan-temuan tersebut kemudian dikonfirmasi dengan memeriksa hasil pengurangan dan presentasi data, memastikan bahwa kesimpulan yang diambil tetap selaras dengan tantangan penelitian.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak diberlakukannya dan penetapan undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa mendapatkan kesempatan untuk mengurus tata kelola pemerintahannya sendiri dan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Pemerintah desa merupakan tingkat terkecil yang membantu pemerintah pusat yang berhubungan langsung dengan pembangunan, pengabdian kepada masyarakat. Pemerintah desa diharapkan lebih mandiri dalam pengelolaan pemerintah dan sumber dayanya, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa dan kapasitasnya, dalam membantu pemerintah desa untuk mengelola keuangan desanya, pada tahun 2015 ini pemerintah pusat melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuat aplikasi keuangan desa yang diberi nama Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dulunya diberi nama SIMDA bertujuan untuk memudahkan pemerintah desa dalam membuat dan melaporkan keuangan. Dengan tuntutan bahwa keuangan desa harus transparansi, akuntabel dan tepat sasaran.

Akan tetapi pada kenyataannya masih adanya kendala dalam pengelolaan siskeudes yang dirasakan oleh operator Siskeudes, seperti perkembangan penggunaan aplikasi di desa Gebang, Munca dan Hanura belum berjalan maksimal, membutuhkan pengelola atau sumber daya manusia yang belum memumpuni, kurangnya sosialisasi, untuk menjawab permasalahan dan rumusan masalah yang ada maka peneliti merumuskan, bagaimana proses pengelolaan keuangan desa 2.0.5 di desa Gebang, Munca, dan Hanura.

5.1 Proses Pengelolaan Keuangan Desa melalui Siskeude 2.0.5 di Desa Gebang, Munca, dan Hanura

Sub bab ini bertujuan menjawab rumusan masalah pertama dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui proses pengelolaan keuangan desa (siskeudes), dari hasil wawancara kepada Desa Hanura, Desa Gebang dan Desa Munca menjelaskan pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi siskeudes memiliki urgensi bagi aparatur desa yang mengurus keuangan desa, yaitu sebagai alat pembantu seperti menghitung keuangan, mengambil keuangan desa serta menghitung pajak dll. Disampaikan oleh Yudi selaku Sekretaris Desa Hanura

“orang – orang desa bukan orang yang ahli dalam semua bidang khususnya mengenai akuntansi, karnakan ini keuangan masih banyak yang awam, sedangkan siskeudes ini aplikasi akutansi yang membantu dalam proses keuangan seperti menghitung keuangan, mengambil uang, menghitung pajak, membuat pelaporan dll, sebenarnya bisa saja manual tapi membutuhkan waktu yang cukup lama, dengan siskeudes membuat terasa mudah”.

Hal ini senada dengan pernyataan operator gebang dan munca yaitu:

“untuk siskeudes tentunya tidak semua dapat mengaplikasikannya, dikarnakan siskeudes membutuhkan pelatihan bimtek dan itu tidak sebentar, bahkan terkadang bisa berbulan-bulan untuk menguasainya”. (operator desa Gebang)

“Tidak semua aparatur paham atau mengerti tentang Aplikasi Sistem Keuangan Desa, dimana yang terlibat dalam menggunakan Aplikasi sistem atau dalam mengelola, orang-orang yang diberi tanggungjawab saja, tidak melulu harus bendahara desa”. (operator desa munca)”

Pengelolaan desa sangat diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus pemerintahannya sendiri serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga desa, begitu juga kekayaan yang dimiliki desa, dengan kepercayaan dan tanggung jawab yang besar pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparasi. Hal ini sesuai dengan penerapan Aplikasi siskeudes sudah dikembangkan dan dipatenkan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

5.1.1 Penginputan

Pengoprasian aplikasi siskeudes diawali dengan pengoneksian data, dengan menggunakan database microsoft acces dengan interface koneksi via ODBC dan *direct acces*. Penggunaan ODBC ialah aplikasi pembaca data, sedangkan *direct acces* aplikasi pembaca file.

“Dalam prosedur penggunaan dari aplikasi Siskeudes yang diawali dengan koneksi data. Koneksi database harus dilakukan pada saat pertama kali aplikasi digunakan. Aplikasi siskeudes berjalan menggunakan database *Microsoft Acces*, dengan interface koneksi via ODBC (*Open Database Connectivity*) dan *Direct Acces*. Penggunaan Koneksi ODBC adalah aplikasi melakukan pembacaan data tidak secara langsung ke *driver MS Acces* akan tetapi menggunakan mesin ODBC pada *windows*, sedangkan aplikasi dengan *Direct Access* adalah pembaca file langsung ke data base yang bersangkutan. Setelah dapat terhubung dengan jaringan siskeudes suda dapat dijalankan”.
(Operator desa Gebang)

Hal ini dijelaskan oleh operator Gebang saat memulai pengenalan pada aplikasi Siskeudes, dan dibenarkan oleh operator Munca dan Hanura.

“aplikasi Siskeudes ini ditujukan kepada aparat pemerintah desa untuk memudahkan pengelola keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan atau pertanggung jawaban, prosedur penggunaan aplikasi siskeudes oleh pemerintah desa dilakukan melalui permohonan dari pemerintah daerah untuk penggunaan aplikasi Siskeudes kepada Kemendagri atau perwakilan BPKP, tujuannya agar penggunaan aplikasi siskeudes dikoordinasika oleh pemerintah daaerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada wilayah pemerintahan daerah. Persetujuan penggunaan aplikasi Siskeudes dilakukan dengan cara memberikan kode SML pemda yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP dan Kemendagri”.

Pernyataan ini dinyatakan oleh operator Munca dengan arahan dari modul Siskeudes tahun 2018.



Gambar 8. Log in User Siskeudes

Sumber: Modul BPKP

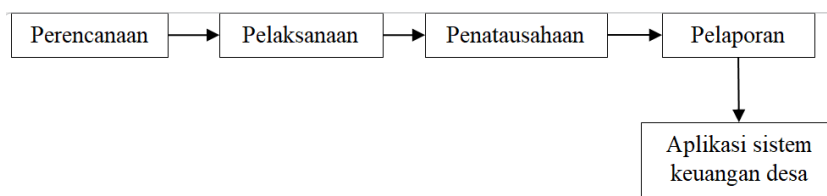
Jika aplikasi telah berhasil di operasikan maka langkah awal dalam pengelolaan ialah memasukkan user ID dan Password guna mengakses akun desa dan memilih anggaran tahun berapa yang hendak dibuka.

“Jika sudah di tahap ini, user akan masuk dengan User ID dan Password yang sudah diberikan kepala desa, desa dapat memilih anggaran tahun berapa yang hendak dibuka sesuai dengan user ID dan password pada tahun tersebut. Setelah bisa masuk ke dalam aplikasi nanti akan muncul tampilan utama dari siskeudes dan menu bar yang terdiri dari file, parameter, data entri, laporan, tools dan help yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan operator siskeudes pada saat melakukan penginputan data”.

Dijelaskan oleh operator Hanura pada tahap ini sudah memasuki tahap memasukan user id dan password yang sudah diberikan kepala desa, yang nantinya dapat melakukan penginputan data. Pada proses penginputan data, data yang dimasukan pemerintahan desa untuk diinputkan ke Siskeudes adalah data perencanaan, penganggaran, penatausahaan. Disampaikan selaku operator desa Gebang. Serta

ditambahkan oleh operator munca bahwa aplikasi ini harus dilaksanakan sesuai prosedur, semua laporan yang sudah selesai akan melewati proses penginputan ke dalam aplikasi sistem keuangan desa. Peginputan dilakukan sekali sesuai dengan transaksi-transaksi yang ada dan akan menghasilkan output berupa dokumen pentausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan perundang-undangan.

“semua proses Siskeudes harus menggunakan prosedur yang sudah ditetapkan, dan sesuai dengan transaksi-transaksi yang ada guna menghasilkan ouput berupa dokumen penatausahaan dan laporan yang sesuai perundang-undangan”.



Gambar 9. Prosedur Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Sumber : Diolah Peneliti, (2022)

“dalam proses penginputan kalau dari menu administrasi sudah pasti mudah dikarnakan seperti login biasa, hanya saja pada menu ini ditetapkan batasan kewenangan pengguna aplikasi untuk mengakses fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi”.



Gambar 10. Penyetingan Menu Administrasi
Sumber : modul BPKP

Dalam proses masuk Siskeudes telah di sepakati bahwa penjelasan ini di jelaskan oleh operator desa Munca dan Hanura, langkah awal yang dilakukan ialah melakukan Login dan penyetingan menu pada administrasi data user.



Gambar 11. Penyetingan Menu Administrasi
Sumber : modul BPKP

“memulai tahap pengelolaan keuangan desa, pertama dengan mengklik menu data entri kemudian pilih submenu perencanaan. Pengisian data perencanaan selalu dilakukan pada awal tahun anggaran dan dilakukan selama satu tahun anggaran, dalam menu ini terdapat visi dan misi desa,, RPJM desa laporan perencanaan”.

Dalam proses perencanaan pastinya ada submenu yang harus diinputkan yang dilakukan pada awal tahun anggaran dan dilakukan selama satu tahun anggaran, dalam menu ini terdapat visi dan misi desa, RPJM desa laporan perencanaan.

“selanjutnya operator desa memasukkan data penganggaran atau data rencana anggaran biaya. Bagian penganggaran digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Dalam penganggaran ini terdapat bidang, sub bidang dan kegiatan, serta pendapatan belanja, pembiayaan 1, pembiayaan 2 anggaran kas desa dan peraturan APBDES dll”.

Berikut masuk kesubmenu penatausahaan:

“dalam bagian ini terdapat penerimaan desa, SPP kegiatan, Pencairan SPP, SPJ kegiatan, Penyetoran pajak, mutasi kas, output dana desa, serta ekspor dan impor data”.

Pelaporan atau pembukuan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018, kepala desa menyusun laporan pelak APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Selain itu, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa setiap akhir Tahun Anggaran. Laporan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa yang disertai dengan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBDesa dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Semua yang diproseskan oleh operator desa dalam mengelola keuangan desa, harus mengikuti prosedur yang ada tidak hanya dalam penginputan hal tersebut juga berkesinambungan dalam pembangunan desa, seperti status desa IDM, Prodeskel atau Profil desa dan kelurahan.

“misal desa membuat jalan berapa banyak atau seperti kemarin desa membuat posyandu berdasarkan APBdes, lalu di rap di siskeudes, jadi sebenarnya aplikasi siskeudes ini khususnya dalam hal penginputan sangat berkesinambungan seperti untuk

IDM, prodeskel atau profil desa dan kelurahan, jadi jika ada pembangunan tidak sembarangan tapi terinput”.

Hal ini sesuai dengan pernyataan operator desa Munca dan Hanura

“aplikasi ini khusus sebenarnya sangat berkaitan dalam penginputan seperti IDM, Prodeskel atau profil desa dan kelurahan, jadi tidak bisa untuk di manipulatif”.

Pernyataan tersebut di tambah juga oleh aparat Desa Munca dan Gebang bahwa, penginputan pengeluaran atau pemasukan keuangan itu harus berdasarkan sistem

“misal pak kades mau belanja jadi harus sudah diatur, dan disiapkan, kenapa? Karna di sistem ini ada aturan dalam waktu 20 hari maksimum buku kas itu 5 juta, mungkin kalo yang lain atau secara manual ada 700 juta bisa diambil semua sedangkan itu tidak boleh, jadi siskeudes menghitung pengeluaran kita dalam belanjanya, jadi pajaknya langsung pisah, jadi itu sistem siskeudes yang mengatur, coba kalau memakai excel pasti di ambil semua, sedangkan di siskeudes tidak dan belanja kita teratur”.

Jadi menurut keenam dari tiga desa yang sudah di wawancara, dalam penginputan data harus disiapkan dan tersistematis oleh pemerintah desa seperti data perencanaan, data penganggaran dan data keuangan. Tidak hanya itu dijelaskan bahwa penginputan yang ada di siskeudes sangat berkesinambungan dalam Indeks Desa dan prodeskel desa, jadi misalkan laporan dari IDM desa kekurangan lapangan maka aparatur membangun lapangan, kemudian membuat RAB (rencana Anggaran Biaya) kemudian RAB tersebut di inputkan di Siskeudes dan belanja melalui Siskeudes, maka belanja nanti berdasarkan IDM dan Prodeskel, jadi pembangunan di desa tidak dapat sembarangan akan tetapi berdasarkan sistem dan laporan.

5.1.2 Proses

Pengoprasian siskeudes dilakukan operator di tiap desanya, Desa Gebang dioprasikan oleh Kaur Keuangan, Desa Hanura sekretaris desa dan Desa Munca kaur perencanaan, kendala yang dihadapi dalam proses penginputan data dari manual ke aplikasi sedikit ditemukan, karena dalam prosesnya pemerintah desa sudah diimbangi dengan pelatihan-pelatihan khususnya untuk operator desa yang mengoprasikan siskeudes, akan tetapi bagi operator desa Munca dan Gebang merasa bahwa, dalam pengoprasian Siskeudes membutuhkan waktu yang cukup lama dalam membiasakan pengoprasian sedangkan jika operator di desa Hanura merasa cukup mudah untuk mengoprasikan siskeudes, tidak hanya itu kendala yang dirasakan operator ialah sarana dan prasarana yang kompeten untuk menunjang pelaksanaan aktivitas khususnya di kantor. Serta mereka berpendapat sarana dan prasarana dapat menghasilkan kinerja yang lebih optimal sesuai dengan pernyataan bapak Yudi di Desa Hanura.

“kalo faseh pelajari aplikasi ini kira-kira 2 jam cukup, pasti bisa pengoprasiaannya”.

Lalu di lanjutkan kembali oleh operator Desa Munca

“tapi yang pasti dalam pengaplikasian siskeudes kita sangat membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, mungkin itu bisa di katakan kendala juga dalam pengelolaan Siskeudes”.

Sedangkan bagi operator Desa Gebang dan Desa Munca

“ya kalo melajari aplikasi siskeudes kira-kira butuh waktu setahun biar faseh dalam pengoprasiaannya”.

“sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam pengoprasian siskeudes seperti komputer atau bisa dengan laptop, printer, dan wifi yang memadai agar mengoptimalkan pekerjaan”.

Perubahan yang dirasakan setelah menggunakan aplikasi siskeudes ialah. pertanggungjawaban kepala desa dan laporan dapat disusun dengan baik serta mengacu pada peraturan yang sudah ditetapkan.

Sebelum adanya aplikasi siskeudes pemerintah desa belum memiliki regulasi yang tepat untuk pengelolaan keuangan desa.

“perubahan pastinya banyak sekali sebelum adanya siskeudes kita pakai excel, dan tidak ada alternatif lain untuk pengelolaan keuangan, kemudian dengan peraturan permendagri yang baru mengenai keuangan desa, pemerintahan desa sangat terbantu dengan aplikasi ini dan sejak dipergunakan aplikasi siskeudes laporan tersusun secara rapi dan sesuai dengan regulasi tadi peraturan pemerintah dalam negeri”. (Operator desa Hanura)

Lalu pernyataan tersebut dilanjutkan oleh operator desa Gebang dan Munca

“perubahan banyak yang sekarang kita benar-bener bisa hanya mengandalkan siskeudes dalam pengelolaan keuangan, bisa berupa softfile dan hardfile (atau cetak) semua-semua sudah ada di menu-menu siskeudes tidak seperti dahulu yang masih ganti-ganti antara excel, bahkan terkadang ketik dan hitung manual”.

Hal ini senada dengan pernyataan dari operator desa Munca dan Gebang, bahwa aplikasi siskeudes membantu kepala desa untuk mempertanggungjawabkan laporan-laporan yang dibuat sesuai dengan peraturan yang ada. Berbeda dengan sebelumnya tanpa aplikasi siskeudes yaitu secara manual yang membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup banyak dalam menyusun laporan keuangannya. Tapi sejak adanya peraturan pemerintah mulai dari permendagri No 114 terkait pembangunan desa dan Permendagri No 113 terkait keuangan desa dan ditindaklanjuti serta diperbaharui dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 mengenai keuangan desa yang akhirnya membantu pemerintah desa dalam keuangan desa sangat membantu dalam menyusun laporan dengan rapi dan sesuai dengan peraturan pemerintah dalam negeri No 20 Tahun 2018.

Tabel 26. Kelebihan Siskeudes dan Sebelum Menggunakan Siskeudes

No	Kelebihan Aplikasi Siskeudes	Sebelum Menggunakan Siskeudes
1	Waktu Pembuatan Laporan Cepat (1 Minggu)	Waktu Pembuatan Laporan Lama (3- 1 Bulan)
2	Pelaporan Penggunaan Anggaran dana Desa Lebih Terperinci dan Jelas	Pelaporan masih adanya kesalahan
3	Membantu mempertanggungjawabkan laporan dengan kebijakan yang ada	Laporan dapat dikatakan masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku atau dapat dikatakan laporan di setiap daerah berbeda

Sumber: Olahan Peneliti

Selain, kelebihan dan kekurangan dari sistem keuangan desa (Siskeudes), juga mengalami beberapa kali pembaharuan yang pertama kali dirilis pada tahun 2020 dengan versi Siskeudes 2.0.2 yang pembaharuannya meliputi perbaikan Form entri, perbaikan Entri RAK, perbaikan Error Posting APBDesa dll, pada tahun 2021 Siskeudes mengalami pembaharuan lagi menuju 2.0.3 dengan pembaharuan penambahan laporan BTT dan realisasi BLT-DD untuk desa, penambahan laporan konsolidasi BTT di tingkat Kab/ Kota serta penyempurnaan menu otoritas user, pada tahun 2022 siskeudes mengalami pembaharuan lagi dengan versi 2.0.4 dengan pembaharuan validasi output kegiatan dibatasi max 99.000, judul entri saldo awal, kunci dan melepaskan kunci transaksi per desa, pada tahun 2023 siskeudes mengalami pembaharuan lagi dengan versi 2.0.5 meliputi penambahan fitur tagging pada paket kegiatan, perbaikan input PRJMDES, cetak proporsi APBDES.

Tabel 27. Pembaharuan Siskeudes

2.0.2	2.0.3	2.0.4	2.0.5
Perbaikan form entri	Penambahan laporan BTT dan realisasi BLT-DD untuk desa	Validasi output kegiatan dibatasi max 99.000	Penambahan input nomor dan tanggal RKPDES
Perbaikan entri RAK	Penambahan laporan konsolidasi BTT di tingkat kab/kota	Judul entri saldo awal-nama desa	Penambahan fitur tagging pada paket kegiatan
Perbaikan Error posting APBDesa	Menu otoritas user disempurnakan	Kunci dan melepaskan kunci transaksi per desa	Penambahan laporan monitoring PEMDA
Perbaikan proporsi Posting 30% 70%	Tambahan informasi ID_Biling di pencairan SPP untuk CMS	Kode sumberdana dikunci sesuai default	Perbaikan inputan RPJMDES
Password penggabungan data Cetak laporan RKPDes pada menu lap penganggaran			Cetak proporsi APBDES di menu laporan Default kalkulator pajak untuk PPN angkanya 11% Penambahan input data penerima SPP Panjar (Digunakan untuk fasilitasi CMS pada SPP Panjar) Fitur sortir pada data SPP Ekspor Data ke Situwassa / aplikasi Sistem Informasi Terpadu Pengawasan Desa
Perbaikan printout nomor perdes dan perkades			

Sumber: Modul Siskeudes

Penginputan data anggaran yang pertama ialah mengisi menu isian data anggaran yang digunakan untuk penginputan data pemerintah desa, setelah mengisi data menu pendataan, menu belanja selanjutnya mengisi menu pembiayaan.

“penginputan data anggaran yang pertama mengisi menu isian data anggaran digunakan untuk penginputan data pemerintah desa. Setelah itu mengisi data menu pendataan yang terdiri dari pendapatan asli desa dan pendapatan transfer. Lalu mengisi pada menu belanja sesuai dengan bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan yakni bidang penyelenggaraan pemerinta desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidan pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang tak terduga. Ada berapa persen, paling sedikit 70% untuk jumlah anggaran belanja. yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan berapa persen lagi dengan maksimal 30% dari anggaran belana desa digunakan untuk belanja operasional. Selanjutnya mengisi menu pembiayaan 1 dan pembiayaan 2. Menu pembiayaan 2 digunakan untuk melakukan penginputan data penerimaan pembiyaan dan menu pembiayaan 2 digunakan untuk melakukan penginputan data pengeluaran pembiayaan”.

Hasil wawancara yang dilakukan dari ke 6 operator desa mengenai alur proses Siskeudes bahwa proses penganggaran yang berlangsung sudah sesuai dengan prosedur yaitu penginputan pendapatan, belanja sampai dengan pembiayaan. Adapun proporsi belanja pada APBDes telah sesuai dengan proporsi yang ditetapkan dalam peraturan PP Nomor 47 tahun 2015 yaitu belanja pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaa masyarakat desa 70% dan belanja operasional sebesar 30%.

“output dalam Siskeudes terdapat dalam pengoperasian modul penatausahaan ini laporan-laporan bulanan yang digunakan untuk pertanggungjawaban sudah dikerjakan di dalam sistem berupa SPP Defenitif pada tahap pelaksanaan. Pada tahap penatausahaan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes, sudah bisa melihat bahkan mencetak output yang berupa laporan buku kas umum, buku bank, dan buku kas pembantu pajak”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa dengan

menggunakan aplikasi Siskeudes, hanya mengklik beberapa menu dalam aplikasi laporan sudah bisa dilihat bahkan dicetak. Berbagai laporan tersedia di dalam aplikasi Siskeudes. Laporan perencanaan, laporan penganggaran, laporan penatausahaan dan laporan pembukuan dapat dengan mudah diakses pada aplikasi Siskeudes maupun dalam laporan cetak.

5.1.3 Output

Dana anggaran desa digunakan atau realisasikan berdasarkan 5 bidang yaitu Pembangunan desa, Pemberdayaan desa, Pembinaan desa serta Penanggulangan bencana dan mendesak darurat desa, dengan contoh seperti saat covid-19 desa menggunakan bidang penanggulangan bencana dan mendesak darurat desa, membuat drenase menggunakan bidang pembangunan desa, hal ini diperkuat oleh para operator desa.

“Manfaat dari dana desa ini, ada 5 bidang yang pertama penyelenggaraan pemerintahan desa kegunaannya, biasanya dari ADD seperti ke pembangunan desa, biasanya untuk drenase dll, buat pembinaan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan yang terakhir penanggulangan bencana mendesak dan darurat desa seperti covid kemarin, itu masuk kesitu, seperti kalo di gebang ada jembatanan longsor artinya perlu dibenahi ya dananya dari situ”.

Dalam penggunaan lima bidang untuk dana anggaran desa ini, berlaku untuk seluruh desa di Indonesia, jadi dana desa tidak dapat di manfaatkan jika tidak ada parameter atau kode rekening untuk menginput laporan tersebut.

“Itu berlaku untuk semua desa, berlaku 5 bidang untuk semua desa, jadi dana tidak bisa dimanfaatkannya di luar 5 bidang itu, kalo ada parameternya atau ada kode rekeneingnya bisa masuk kesitu, tapi kalo diluar situ tidak bisa”.

Dalam realisasi dana anggaran, tentunya pemerintah desa tidak sembarang tentunya ada aturan dalam pengelolaan keuangan desa, tentunya berdasarkan peraturan bupati No 55 tentang pengelolaan desa yang diambil dari pemendagri, dengan perumpamaan jika desa

diberikan 100 juta maka saat penyusunan anggaran, desa mengadakan musyawarah desa guna mengajukan aspirasi dengan disesuaikan oleh 5 bidang tadi.

“Seandainya desa dapat 100 juta, untuk penyerapan 100% atau kegunaan 100% itu gunanya berdasarkan peraturan bupati No 55 tentang pengelolaan desa, yang di ambil dari pemendagri jadi anggaran itu pasti dateng H-1 tahun, jadi misal anggaran 2024, ini di anggarankan 2023 itu maksimal 30 desember 2023, jad waktu penyusunan, itu di adakan musyarawah desa, jadi di dalam musyawarah desa, dijelaskan kita dapat 100 juta, buat apa saja, disilahkan mengajukan aspirasi, dari aspirasi itu nanti dari tim penyusun APBDes itu, memilih dan memilah mana urgensi yang dimasukkan, dan di sesuaikan dengan bidangnya , karna kalo tidak sesuai tidak bisa masuk, jadi berdasarkan musyawarah, itu sampai 100 juta, karna tidak mungkin kalo di desa di kasih 100 juta sisa, nggk mungkin yang ada kurang, dan tidak hanya di desa tapi semua , jadi berdasarkan musyawarah tadi”.

Dalam memasukkan anggaran ke 5 bidang, tentunya dibutuhkan kode rekening, kode rekening ini bersifat kunci dari pemendagri dan tidak dapat diganggu gugat atau di manipulasi, jadi jika tidak sesuai di Review APBDes, maka laporan tersebut tidak akan di Acc oleh inspektorat dan PMD, jadi laporan belanja desa dilakukan pengecekan bukan setelah belanja, akan tetapi sebelum belanja desa.

“Kode rekening nggak bisa di manipulasi karna itu kunci dari pemendagri itu ada penjelasannya, itu kode rekening udah disitu, jadi tidak bisa diotak-atik karna penyusunan juga melewati tahap yang banyak jadi kemungkinan kecil sekali bisa di manipulasi kode rekening, kalo tidak sesuai di review APBDes itu tidak akan di ACC sama inspektorat, sama PMD dan tenaga ahli kabupaten, udah sesuai peraturan belum, kalo belum di coret , di ganti dan di alihkan, jadi kalo udah fix jadi, itu udah d review dan di periksa jadi bukan setelah belanja di periksa, tapi sebelum belanja sudah di periksa”.

Jadi, adanya penyelewengan dana desa bukan berarti kode rekening yang dimanipulatif akan tetapi permainan fiktif, dengan contoh jika ada anggaran laptop untuk 1 tahun dengan anggaran 20.000.000 lalu ternyata kepala desa tidak merealisasikan, maka audit inspektorat akan memanggil kepala desa tersebut untuk mengembalikan dana ke kas

negara, tidak langsung dijatuhkan proses hukum, tetapi jika uang tersebut tidak masuk dalam kas negara berdasarkan waktu yang telah ditentukan, maka jika ada kepala desa melakukan penyelewengan dana desa dan dipenjara, maka dapat disimpulkan bahwa kepala desa, tidak mengembalikan dana desanya.

“dalam penyelewengan dana desa, itu tanda kutip itu biasanya oknum, biasanya permainannya di fiktif, jadi misalkan, ada anggaran laptop, untuk satu tahun itu anggaran Rp. 20.000.000, terus kepala desa tidak direalisasikan, dan pas di periksa nggak ada laptopnya, sama dengan kegiatan yang lain yang ada di APBDes, makanya di audit inspektort jika ditemukan itu, langkah pertama kepala desa itu disuruh mengembalikan ke kas negara , tidak langsung proses hukum, akan tetapi di rekomendasikan dulu oleh inspektorat ke kas negara dulu, jadi kenapa kepala desa banyak di penjara, itu karna kepala desanya tidak mau membalikan uangnya kekas negara, dan inspektorat ada batas waktunya dari pemeriksaan”.

Untuk opini wajar tanpa pengecualian atau penilaian dari BPK, Cuma setingkat inspektorat kabupaten, untuk kepala desa WTP tidak ada karna dana cuma sedikit

“Audit ada tiga yaitu kepatuhan, operasional, dan keuangan untuk menyatakan opini wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, itu dengan audit keuangan itu terkait dengan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) hasilnya, dan tidak mencakup kedesa masalahnya, di desa itu hanya audit kepatuhan, audit operasional, jadi WTP tidak melibatkan keuangan yang ada di desa, walaupun inspektorat, insepktorat bukan audit keuangan akan tetapi audit operasional, jadi inspektorat itu hanya pembinaan dan pengawasan”. (Sukmiridiato, Inspektorat Lampung Timur)

Di desa adanya pembinaan dari inspektorat jika adanya penyelewengan dana, dan jika adanya penyelewengan dana inspektorat hanya melakukan rekomendasi pengembalian dana ke kas negara jadi hanya menitik beratkan pembinaan, jika adanya desa tidak melakukan pengembalian dana ke kas negara dengan tanggal waktu yang telah di tetapkan, maka inspektorat tindaklanjuti ke Polres dan kejaksaan.

“Di desa itu adanya pembinaan dari inspektorat, seperti jika ada penyelewengan dana tadi maka, inspektorat hanya melakukan

rekomendasi pengembalian dana desa ke kas negara, jadi hanya menitik beratkan pembinaan, makanya tadi tidak ada panisemen atau hukum, yang ada disuruh mengembalikan jika ada kesalahan, setelah dibina dan di periksa, jika ada temuan-temuan masuknya ke NHP, nota hasil pemeriksaan, misal dari 2 milyar tadi ada temuan 100 juta lalu ditanya, maka dapat dijawab ini ada, pajak dibayar dll, ternyata lengkap sisa 10 juta, nah masuknya setelah NHP, muncul lagi LHP, atau laporan baru dilaporkan oleh inspektorat ke kepala inspektur, setelah LHP jika tidak diurus oleh pemerintah desa itu nongolnya ke tindak lanjut dan itu sudah berhubungan dengan bagian hukum bisa ke polres dan kejaksaan, jadi kunci desa ini di inspektorat. Jadi nanti mereka ini dari kabupaten tetep kuncinya inspektorat, jadi dari inspektorat ini nanti bersurat ke desa, ini ada yang perlu di tindak lanjuti misal, dan di beri waktu sebulan, setelah surat ini terbit, dan itu diurus sama desa, kalo tidak diurus masuk ke jaksaan dan polres, itu yang banyak kasus ditemukan, tapi kalo desanya respect atau mau ngerjain itu, maka tidak da catatan di pengelolaan keuangan di 2023, kalo tidak ada catatan mau nyalon kepala desa lagi ya tinggal rekom dari inspektorat, karna kepala desa tidak bisa nyalon kalo ada catatan dari inpektorat, jadi kalo WTP ini sangat jauh". (operator desa Gebang)

5.1.4 Manajemen POAC

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Yang tentunya memiliki tahapan pelaksanaan yang dapat dilihat melalui fungsi manajemen serta peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018:

1. Perencanaan atau *planning* dari Siskeudes telah tercantum di modul Siskeudes bagian BAB II dijelaskan bahwa perencanaan dalam aplikasi siskeudes digunakan dalam entri data dan penyusunan perencanaan jangka menengah (RPJMDes) dan perencanaan tahunan (RKPDes) dijelaskan pada wawancara yang dilakukan bahwa *planning* dalam aplikasi Siskeudes sebagai berikut.

“dalam Siskeudes ini sebenarnya tidak ada target atau sasaran karna aplikasi ini bukan ranah membuat kebijakannya, tapi planning yang bisa dibicarakan di aplikasi siskeudes ini bisa dicontohkan menetapkan perencanaan untuk tujuan pengelolaan keuangan desa dan mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan”.

Dilanjutkan oleh operator Gebang

“tidak ada target kalau Siskeudes, karna ini aplikasi pengelolaan keuangan dan kita tidak bisa membuat kebijakan”.

Dan dibenarkan oleh operator munca

“target tidak ada, dari pusatnya memang Siskeudes hanya Aplikasi Pengelolaan keuangan desa”.

Dijelaskan bahwa perencanaan yang dimaksud pada aplikasi siskeudes ini ialah, menetapkan perencanaan untuk tujuan pengelolaan keuangan desa kedepannya dan mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan, dan merencanakan struktur sistem penatausahaan yang mencakup bagaimana pencatatan keuangan akan dilakukan.

Pengorganisasian atau *organizing* tercantum pada modul siskeudes bab III mengenai penganggaran, *organizing* yang dimaksud dalam aplikasi siskeudes ini bisa dicontohkan pembentukan PPKD (pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) yang bertanggung jawab atas penganggaran keuangan desa pada masing-masing kegiatan.

“*organizing* mungkin bisa kita contohin seperti menetapkan peran, tanggung jawab dan wewenang dari setiap individu atau kelompok yang terlibat dalam perencanaan manajemen keuangan desa lalu pelaporan yang dilaksanakan oleh kaur keuangan desa sebagai kebhendaharaan desa”. (Operator desa Hanura)

Pernyataan tersebut ditambahkan oleh operator Desa Munca dan Gebang

“ketika kegiatan sudah dianggarkan di APBDes dan sesuai dengan kegiatan maka kepala desa menunjuk perangkat desa sebagai tim pelaksana kegiatan (TKP) untuk melaksanakan kegiatan di lapangan”.

Dijelaskan bahwa *organizing* yang dapat dicontohkan pada pengelola Siskeudes seperti menetapkan peran tanggung jawab dan wewenang, serta membuat rencana yang terperinci tentang bagaimana pencatatan keuangan akan dilakukan, prosedur yang harus diikuti dan siapa yang bertanggung jawab atas setiap langkah dalam penatausahaan.

2. Pada pelaksanaan atau *actuating* terdapat pada modul IV yaitu penatausahaan yang dapat dicontohkan pada pengelolaan Siskeudes seperti melaksanakan rencana berdasarkan data umum desa . visi-misi yang telah disusun serta melakukan proses input penganggaran secara akurat dan teratur.

“*actuating* bisa dicontohkan misal dalam perencanaan *actuatingnya* melaksanakan rencana berdasarkan data umum desa, visi misi yang telah disusun, contoh lain *actuating* juga melakukan proses input penganggaran secara akurat dan teratur sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, lalu memulai proses pelaksanaan atau penggunaan dana sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkann dalam rencana anggaran”. (Operator desa Gebang)

Hal ini dilengkapi oleh operator desa Hanura dan Munca

“dalam pelaksanaan bisa dibilang itu penatausahaan di Siskeudes, dalam penatausahaan itu catatan waktu ada penerimaan dan pengeluaran kas desa yang wajib dilakukan oleh Bendahara Desa, dan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, serta wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, dokumen yang dikeluarkan harus sesuai dengan anggaran dalam APBDes, berdasarkan dari surat permintaan pembayaran (SPP) yang telah disetujui oleh kepaladesa. Serta seluruh pencatatan tersebut harus memiliki bukti sesuai yang ada, setelah dicek oleh sekretaris desa sebelum nantinya di laporkan ke kepala desa”.

Actuating dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan. Dilakukan oleh bendahara keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes. Bukti transaksi ialah pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan.

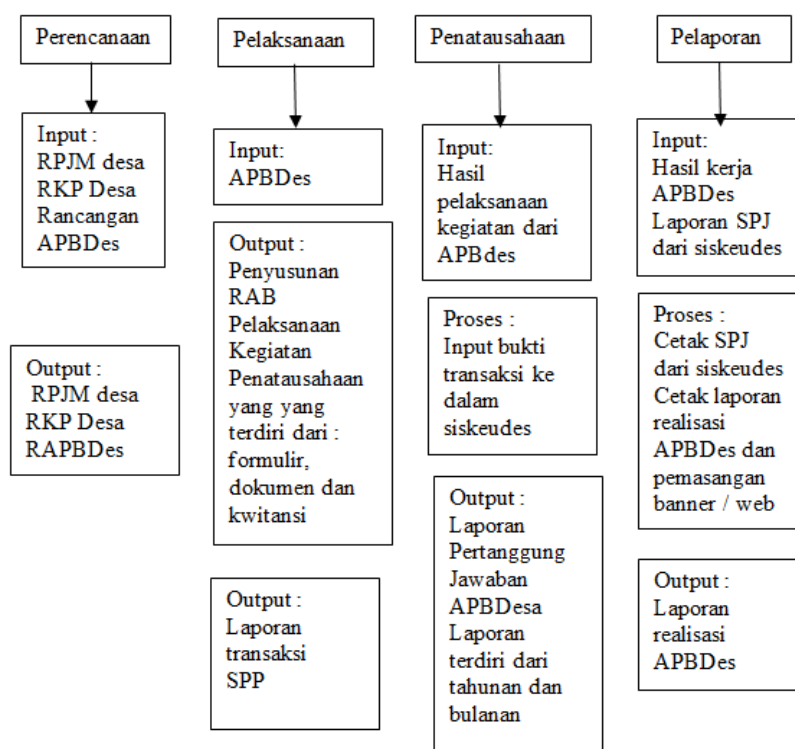
3. Jika *controlling* berada di bab V mengenai modul pelaporan disana dijelaskan kepala desa menyusun laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada bupati/walikota melalui camat. Selain itu, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB desa setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut ditetapkan dengan peraturan desa yang disertai dengan laporan keuangan.

“controlling kalo dari modul ya bab V tapi kalo dari pengelolaannya contohnya bisa di ambil memastikan bahwa proses perencanaan keuangan desa berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun, melakukan pelaporan secara berkala berkait penganggaran yang dilakukan serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan”.

Hal tersebut ditambahkan oleh operator desa Munca

“pelaporan dibuat sesuai dengan peraturan mendagri, dilakukan operator siskeudes yaitu bendahara dengan diketahui oleh kepala desa. Ada empat pelaporan yaitu bulanan, triwulan, semester dan tahunan, laporan bulanan dilaporkan setiap ulan kepada kecamatan, laporan triwulan dilakukan setiap tiga bulan dilaporkan ke kabupaten. Laporan semester dilaporkan setiap enam bulan sekali ke bupati melalui camat, sedangkan laporan tahunan dibuat setahun sekali dilaporkan ke pusat serta laporan kepada masyarakat melalui rapat dusun dan RT”.

Controlling dalam pengelolaan keuangan desa ialah memastikan bahwa proses perencanaan keuangan desa dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun atau dapat dicocokkan pada modul siskeudes pada bagian bab V. Tujuan dari *controlling* atau mengenai pelaporan keuangan desa ialah bentuk pertanggungjawaban lembaga atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam suatu periode tertentu, serta sebagai alat evaluasi karena menyediakan informasi posisi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan.



Gambar 12. Struktur POAC Sistem Keuangan Desa

Kesimpulan dari wawancara mengenai proses pengelolaan keuangan desa 2.0.5 ialah, Sistem keuangan desa memiliki urgensi bagi aparatur desa yang mengurus keuangan desa, yaitu sebagai alat bantu seperti menghitung keuangan, mengambil uang desa, menghitung pajak sampai pelaporan keuangan desa. Pengelolaan desa sangat diberikan kesempatan besar untuk

mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga desanya, begitu juga kekayaan yang dimiliki desa, serta kepercayaan dan tanggung jawab yang besar dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Pada sistem keuangan desa tentunya saling berkesinambungan, antara input, output, SDM serta manajemennya (POAC) berawal dari input dimana pengelola siskeudes harus menyiapkan data-data yang akan di inputkan ke aplikasi siskeudes, yang dimana inputan dari sistem keuangan desa ini sangat berkesinambungan pada indeks desa dan prodeskel desa, tidak hanya itu bahkan OMSPAN. Dengan gambaran jika IDM desa kekurangan fasilitas maka aparat desa membangun fasilitas tersebut, kemudian membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) kemudian RAB tersebut diinputkan di Siskeudes dan belanja melalui Siskeudes, maka belanja nanti berdasarkan IDM dan Prodeskel, jadi dengan kata lain, pembangunan desa tidak dapat sembarangan akan tetapi berdasarkan sistem dan laporan.

Kendala yang dihadapi dalam proses penginputan data dari manual ke aplikasi sedikit ditemukan, karena dalam proses penginputan data dari manual ke aplikasi sedikit ditemukan, karena dalam prosesnya pemerintah desa sudah diimbangi dengan pelatihan-pelatihan khususnya untuk operator desa yang mengoperasikan Siskeudes, akan tetapi bagi operator desa Munca dan Gebang merasa bahwa, dalam pengoperasian siskeudes membutuhkan waktu yang cukup lama dalam membiasakan pengoperasian siskeudes. Tidak hanya itu kendala yang dirasakan operator ialah sarana dan prasarana yang kompeten untuk menunjang pelaksanaan aktivitas khususnya di kantor. Serta mereka berpendapat sarana dan prasarana dapat menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

Akuntabilitas desa merupakan kewajiban pemerintah desa memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi dana dan masyarakat. Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban pengelolaan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu dengan adanya aplikasi siskeudes perubahan yang dirasakan setelah menggunakan aplikasi siskeudes ialah pertanggungjawaban kepala desa dan laporan dapat disusun dengan baik serta mengacu pada peraturan yang sudah ditetapkan. Dimana sebelum adanya aplikasi siskeudes pemerintah desa belum memiliki regulasi yang tepat untuk pengelolaan keuangan desanya sendiri.

Secara sistematis singkat pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi Siskeudes data masukan (input) aplikasi Siskeudes berupa :

1. Data Perencanaan
 - a. Data Renstra Desa
 - b. RPJM Desa
 - c. RKP Desa
2. Data Penganggaran
 - a. Data Rencana Anggaran Pendapatan
 - b. Data Rencana Anggaran Belanja
 - d. Data Rencana Anggaran Pembiayaan (penerimaan)
 - e. Data Rencana Anggaran Pembiayaan (pengeluaran)
3. Data Penatausahaan
 - a. Penerimaan Desa
 - b. SPP Kegiatan

Data keluaran (output) aplikasi Siskeudes berupa laporan-laporan berikut:

1. Laporan Perencanaan
2. Laporan Penganggaran
3. Laporan Penatausahaan
4. Laporan Pembukuan

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti pengelolaan keuangan desa yang mengacu pada permendagri No 20 Tahun 2018 diperoleh analisis yang mencakup beberapa tahap yaitu:

a. *Perencanaan/Planning*

Tahap perencanaan merupakan pokok yang penting saat rancangan pembangunan. Penggunaan dana desa harus disusun terlebih dahulu rancangannya, dimana dalam merancang penggunaan tersebut harus dimusyawarahkan dengan melibatkan berbagai pihak diantaranya keterlibatan pemerintah desa dan para masyarakat dalam perencanaan tersebut. Tahap perencanaan baik dalam menyusun maupun mengevaluasi program kerja pada desa Gebang, Munca dan Hanura sudah melaksanakan dengan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan musyawarah yang diadakan di desa untuk menghasilkan keputusan yang harus dilakukan terlebih dahulu, dalam skala prioritas dalam pembangunan.

Pada umumnya dalam proses *planning*/rencana dana desa diawali dengan penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) desa. Sebelum penyusunan diadakan dahulu musyawarah desa. Musyawarah desa dilaksanakan guna membahas tentang arah dan rencana prioritas pembangunan desa, dan sumber pembiayaan kegiatan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Hasil kesepakatan dalam musyawarah akan dituangkan dalam

berita acara dan menjadi landasan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMdes). Akuntabilitas dan transparansi dari perencanaan dapat dilihat dari proses penyusunan RPJM desa, RKP desa, pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam prosesnya sehingga hal ini dapat dipertanggungjawabkan.

b. Pelaksanaan / *Organizing*

Pelaksanaan dalam pengelolaan desa merupakan penerapan dari realisasi APBDes. Pelaksanaan di desa Gebang, Munca dan Hanura dilaksanakan setelah APBDes dijalankan dan sudah diatur tentang RAB . bendahara desa mengatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran harus dilengkapi dengan bukti transaksi. Bukti transaksi tersebut adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan. Di dalam bukti transaksi minimal memuat data pihak yang mengeluarkan atau membuat, kesimpulannya setiap pelaksanaan kegiatan perangkat desa harus mengajukan SPP dalam proses pencairan dananya dengan disertai dengan laporan pertanggungjawaban serta laporan bukti transaksi yang lengkap dan sah, sebelum adanya pencairan dilakukan dulu proses pengecekan kembali oleh empat pihak pemerintah desa.

Berdasarkan hasil di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pengelolaan dari 3 desa, sudah berjalan dengan baik karna jika kegiatan tersebut tidak ada dalam anggaran tahunan maka tidak boleh disetujui apalagi ditandatangani oleh pihak keempat pihak (Kepala desa, Sekretaris desa, kasi pelaksana dan bendahara desa) maka dianggap tidak sah. Akuntabilitas dapat dilihat dari pelaksanaan yaitu dengan adanya input dari siskeudes terhadap program kegiatan yang ada, kegiatan dapat dikontrol supaya lebih efektif. Pengawasan menjadi lebih efektif karena

pengeluaran dana hanya untuk kegiatan yang diperlukan dan telah direncanakan pada tahun berjalan.

c. Penatausahaan/*actuating*

Penatausahaan berfungsi sebagai pengendalian terhadap pelaksanaan APBDes. Pencatatan uang masuk dan keluar dilakukan secara periodik, yaitu setiap terjadi transaksi dan ditutup setiap akhir bulan. Penatausahaan pastinya menggunakan siskeudes. Sebelum data dimasukkan ke sistem oleh siskeudes, terlebih dahulu dibuat oleh bagian keuangan dan dikoreksi oleh sekretaris desa sebelum nantinya dilaporkan kepala desa. Akuntabilitas dari penatausahaan ialah adanya kontrol dana pengeluaran dan penerimaan, semua transaksi yang telah dikeluarkan dimasukkan ke dalam siskeudes guna proses pertanggungjawaban bendahara sebagai yang mengatur dan mengelola keuangan, dalam hal ini proses penginputan data sangat memudahkan dengan adanya siskeudes, jika sebelumnya penggunaan sistem yang manual memungkinkan adanya kehilangan bukti transaksi dalam proses berjalannya pengelolaan yang belum tutup buku.

d. Pelaporan/*controlling*

Pelaporan ialah bentuk pertanggungjaawaban dalam mengelola keuangan desanya. Pelaporan berisi laporan realisaasi pelaksanaan APBDesa yang akan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat berupa laporan semester dan laporan semester akhir tahun. Selain itu pelaporan juga sebagai bentuk transparasi perangkat desa terhadap masyarakat, khususnya masyarakat di desa Gebang, Munca dan Hanura. Dalam pelaporan menggunakan dua cara yaitu online melalui siskeudes dan pelaporan hardcopy yang memerlukan laporan bukti transaksi. Pelaporan ini disampaikan kepala desa kepada bupati melalui camat. Akuntabilitas dari pelaporan yaitu

bendahara desa dalam melakukan pelaporan bersifat *online* dan *offline*. Pelaporan sudah ada dalam siskeudes ketika memasukkan data transaksi. Jadi pelaporan yang didapatkan lebih bersifat *kredibel* (dapat dipercaya).

Tingkat akurasi dan kepatuhan data terhadap regulasi dan standar akuntansi yang berlaku menunjukkan bahwa sistem Siskeudes 2.0.5 dapat diandalkan untuk pengelolaan keuangan desa. Akurasi data yang tinggi mencerminkan bahwa data yang diinput sesuai dengan dokumen pendukung dan realitas di lapangan. Kepatuhan terhadap regulasi seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa data yang diinput sudah sesuai standar. Secara keseluruhan, melalui evaluasi terhadap setiap tahapan output, terlihat bahwa Siskeudes 2.0.5 efektif dalam mengelola informasi keuangan desa, meskipun ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut dalam hal prosedur pengumpulan data, validasi, dan verifikasi untuk meningkatkan akurasi dan keandalan sistem.

5.1 Efektivitas Keuangan Desa (Siskeudes) 2.0.5 di Desa Gebang, Munca, dan Hanura

5.2.1 Keberhasilan Program

Sistem keuangan desa (Siskeudes) adalah sebuah aplikasi pengelolaan keuangan yang dikembangkan oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) untuk dapat meningkatkan pengelolaan keuangan desa menjadi lebih baik dan menghasilkan laporan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari hasil wawancara yang dilakukan kemudahan dalam memahami cara menggunakan aplikasi siskeudes khususnya dari cara penyusunan manual lalu berganti menggunakan aplikasi menurut desa Gebang, Munca dan Hanura sebagai berikut.

“kalo membahas kemudahan sebenarnya relatif dan tergantung para operator, kalo saya memahami aplikasi ini ya mungkin butuh waktu 2 jam untuk memahaminya yang penting mengerti alur tiap input datanya, tapi yang pasti, dari manual ke aplikasi sangat terbantu dengan adanya aplikasi ini, kalo dulu kita memakai excel sangat membutuhkan waktu yang lama dalam membuat laporan”.

Berbeda dengan tanggapan operator Desa Hanura, operator desa Munca dan Gebang merasa dalam kemudahan mengoperasikan siskeudes dari manual ke aplikasi membutuhkan waktu yang cukup lama.

“ya kalo bahas kemudahan, sebenarnya cukup mudah akan tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menguasai mungkin satu tahun, apalagi siskeudes terus mengalami perubahan dan peningkatan ya dalam perbaruan aplikasinya”.

Dalam menguasai sistem keuangan desa, ketiga desa memiliki pandangan yang berbeda, operator Hanura merasa cukup menguasai aplikasi dalam waktu yang cukup singkat, sedangkan desa gebang dan munca memiliki pandangan bahwa dalam menguasai aplikasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Akan tetapi dengan memahami aplikasi Siskeudes walau beberapa operator merasa cukup lama, tidak ditemukannya kendala dalam mewujudkan target atau sasaran pada aplikasi Siskeudes dikarenakan dalam aplikasi siskeudes tidak adanya target sasaran, dikarenakan aplikasi siskeudes tidak dapat membuat kebijakan hanya aplikasi pelaporan keuangan desa, akan tetapi dengan hadirnya aplikasi siskeudes sangat membantu khususnya pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan.

Dalam bagian ini teori campbell juga menekankan memiliki keberhasilan dan pencapaian dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk mengukur efektivitas, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Siskeudes telah mencapai tujuannya yaitu membantu para pemerintah desa dalam membuat laporan keuangan desanya.

5.2.2 Ketepatan Sasaran

Keberhasilan sasaran efektivitas ditinjau dari output dan prosedur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

“untuk target sasaran pada aplikasi siskeudes jelas tidak ada, aplikasi siskeudes hanya untuk pelaporan siskeudes bukan untuk membuat kebijakan seperti adanya target sasaran, tapi walau hanya aplikasi yang berbasis akuntansi, aplikasi siskeudes sangat membantu pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan”.

Pernyataan ini juga dibenarkan oleh operator desa Munca dan Gebang

“tidak ada target sasaran dalam aplikasi siskeudes, dikarenakan ini aplikasi akuntansi yang hanya membantu pelaporan dalam bentuk *hardfile* dan *softfile*”.

Jika ketepatan sasaran dilihat bagaimana dengan penggunaan anggaran dan prioritas alokasi dana di desa maka

“alokasi dana lebih terfokus pada pengembangan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Kami juga mulai berinvestasi dalam pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua ini didukung oleh perencanaan yang matang dan musyawarah dengan masyarakat” operator desa Hanura

“kami masih fokus pada penyediaan kebutuhan dasar, seperti jalan dan fasilitas. Anggaran juga dialokasikan untuk pelatihan seperti siskeudes ini ada juga pelatihannya” operator desa gebang

“ dana digunakan untuk kebutuhan dasar seperti perbaikan jalan, jembatan dan infrastruktur dasar lainnya fokus utama adalah memastika kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, walaupun keterbatasan anggaran sering menjadi tantangan” operator desa munca

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa sistem keuangan desa (Siskeudes) hanyalah aplikasi yang membantu pemerintahan desa dalam pelaporan keuangan kepusat, bukan untuk membuat kebijakan seperti adanya target sasaran.. jika dilihat berdasarkan dana maka target sasaran pada tiap desa berbeda-beda, seperti desa hanura yang memfokuskan pengembangan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, desa gebang penyediaan kebutuhan dasar dan fasilitas, desa munca memfokuskan pada infrastruktur jalan danlainnya.

5.2.3 Kepuasan Program

Pada kepuasan program yang dirasakan oleh para pengguna terhadap kualitas produk seperti Kendala yang dirasakan dalam aplikasi dari ketiga operator yang mengoperasikan siskeudes ialah sinyal dan sebelum adanya pembaharuan aplikasi adanya permasalahan pada data buku kas umum (BKU) dan tingkat keamanan yang cukup rendah dikarenakan data dapat diubah-ubah, akan tetapi dengan pembaharuan kendala seperti itu cukup di minimalisir karna sudah ada password admin yang dimana hanya operator yang dapat merubah data tersebut, jadi untuk saat ini tingkat keamanan aplikasi Siskeudes sudah aman.

“untuk kendala saat ini sinyal, kalo dulu memang sering ada masalah di pelaporan data adanya sedikit selisih, dan kelemahannya dulu data itu bisa di ubah-ubah selain operator, tetapi sekarang sudah ada pembaruan sudah ada kunci administrator jadi untuk tingkat keamanan juga sudah bagus”.

Hal tersebut dibenarkan oleh operator Munca dan Gebang

“kendala pastinya sinyal, dan bimbingan teknis, dikarenakan Siskeudes selalu mengalami perubahan, terkadang agak membuat bingung untuk diingat, maka dari itu masih membutuhkan bimbingan, tetapi dari perubahan aplikasi yang selalu upgrade sangat meningkatkan keamanan juga, sekarang sudah ada kunci administrator itu makin aman, jadi tidak bisa di ubah-ubah orang yang tidak bertanggung jawab”.

Hal positif dari pemerintah meluncurkan Siskeudes tentunya Siskeudes sangat membantu pengelolaan keuangan desa, jika ada desa yang belum menggunakan Siskeudes, maka dapat diyakini bahwa laporan keuangan desanya sangat tidak sistematis dan tersusun rapih, kalo tidak menggunakan Siskeudes, sekarang ada laporan OMSPAN (*Online Monitor SPAN*) kalo itu tidak terbaca di siskeudes tidak dirincikan OMSPAN tidak terbaca dan laporan tidak dibaca maka keuangan desa tidak dapat masuk, karna OMSPAN dari laporan keuangan (Siskeudes).

“hal positif pastinya sangat menggampangkan para pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan, karna Siskeudes sangat

membantu dan bersifat *online*, atau bisa dibilang saling berkesinambungan, kalau ada desa yang belum menggunakan Siskeudes, saya yakin sangat acak-acakan laporan keuangannya, karna Siskeudes juga berkesinambungan dengan OMSPAN”.

Lalu ditambahkan kembali oleh keenam operator bahwa untuk pelatihan aplikasi Siskeudes belum maksimal dari pusat, maka para operator lebih belajar bersamaan atau melihat tutorial yang ada saja.

“Paling terkendala dengan pelatihan juga yang belum maksimal, jadi kami biasanya saling sharing atau lihat di tutorial *youtube*”.

Serta kendala yang dirasakan ialah dalam bentuk laporan atau fisik, seperti fisik pendukung (hutang, laporan pajak, potongan pajak) yang masih secara manual dan kelengkapan seperti data pendukung (foto, berita acara serah terima, SK) semua itu harus di lampirkan di lampiran cetak Siskeudes.

“bentuk laporan fisik juga kadang terkendala karna masih manual, sedangkan laporan fisik itu harus terus dilampirkan untuk cetak Siskeudesnya”.

Menurut para operator pengelolaan keuangan desa Munca, Gebang dan Hanura aplikasi Siskeudes sudah cukup bagus, bahkan sudah dapat memotong pajak, akan tetapi akan lebih baik jika dalam pengawasan disempurnakan, seperti yang belum di awasi dalam aplikasi Siskeudes, jika pak kades mengambil semua uang 700 juta. Untuk range berapa hari itu yang belum terawasi, untuk sekarang masih dibiarkan saja dalam waktu satu bulan padahal untuk kegiatan tidak mungkin hanya satu bulan, jika uang tersebut dalam berapa bulan hanya habis 500 juta, sedangkan masih adanya uang diluar kegiatan, maka tidak dapat membuat laporan, sedangkan semua pengeluaran harus terdata. Seperti yang di tegaskan oleh inspektorat jika tanggal 20 Juni mengambil uang 700 juta, maka 20 juli uang tersebut sudah wajib dipergunakan semua.

5.2.4 Tingkat Output dan Input

Transparasi yang dilakukan dari ketiga desa ini ialah mencantumkan informasi publik berupa rencana kerja, anggaran, RAPB (Rapat Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanda) desa, APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja) desa, DPA (dokumen pelaksanaan anggaran), LKPJ (Laporan keterangan pertanggungjawaban), LPPD (Laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah), ILPPD (Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), PBB (Pajak Bumi Bangunan), pada web desa masing-masing, akan tetapi data yang di laporkan pada web tersebut tentunya tidak selengkap itu, karna masih adanya kerahasiaan yang harus dijaga antar desa.

“untuk keterbukaan laporan keuangan, kami membukanya di web desa, dan itu hanya data saja, tapi kami juga ikut KPK, karna KPK meminta kami terbuka, tapi yang pasti dengan menampilkan seperti ini tidak ada kecurigaan lagi terhadap pemerintah desa, tidak hanya itu kementerian juga buka kemendes namanya, jadi APBDesa juga ada di web itu, dan itu semua hasil cetak Siskeudes, pada intinya Siskeudes tidak bisa di lihat semua orang, akan tetapi data dapat di cantumkan, jadi laporan keuangan desa itu terbuka tapi masih ada yang tidak harus di tampilkan keseluruhan masyarakat, jadi transparasi yang di maksud ini ialah, lebih antara desa dan pusat”.

Akan tetapi pada desa munca dan gebang web desa belum berjalan maksimal dikarenakan masih banyaknya kelengkapan data yang belum dilengkapi.

“kalo untuk WEB desa Munca dan Gebang memang belum berjalan maksimal terutama mengenai informasi dikarenakan kelengkapan data yang belum terpenuhi”.

Sedangkan pandangan bagi masyarakat mengenai output di desa ialah:

“ kalo output memang masyarakat desa ini tidak terlalu mengurus dana anggaran keluar buat apa dan kemana saja karna kan ada musyawarah desa setiap tahunnya untuk desa, tapi kalo memang ditanya ada tidaknya laporan keuangan kaya desa lainnya, desa gebang belum menayangkan laporan keuangan di web, dan banner di depan kantor ya “ (Masyarakat desa gebang)

“ laporan keuangan desa ada di web desa, bisa dilihat disana walaupun terkadang tidak update, tapi kami juga tidak terlalu musingkan itu, karna kami percaya pemerintah desa” (Masyarakat desa Munca)

“ laporan keuangan desa hanura menurut saya sudah transparasi, karna memang di web hanura aktif banget mengenai kegiatan-kegiatan dan laporan, banner di depan kantor juga ditampilkan, dan sering juga mengadakan musyawarah desa” (Masyarakat desa Hanura)

Dalam transparasi keuangan desa bagi masyarakat desa setempat, sudah memenuhi capaian akan tetapi memang masih adanya desa yang laporan keuangannya masih belum diperbaharui, dikarnakan masih adanya laporan-laporan yang belum lengkap, atau masih adanya kendala.

5.2.5 Pencapaian Tujuan

Dalam pencapaian tujuan ialah kemampuan operasional dalam melaksanakan program yang sesuai dengan tujuan dan mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, dalam hal ini dari ketiga desa telah memenuhi pencapaian tujuan tersebut.

Seperti dijelaskan pada komponen sebelumnya bahwa pengelolaan keuangan desa melalui Siskeudes sangat membantu pemerintahan desa dalam mengurus keuangan desanya, dari penginputan sampai laporan yang dihasilkan.

Hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya, bahwasanya efektifitas pengelolaan Siskeudes di Desa Munca, Gebang dan Hanura berjalan dengan efektif, dengan diukur berdasarkan teori campbell:

1. Berdasarkan indikator keberhasilan program, serta efisiensi penggunaan atau proses dalam pengaplikasian maka, Siskeudes aplikasi keuangan desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk dapat meningkatkan pengelolaan keuangan desa, yang tadinya

dilakukan secara manual, antara aplikasi *excel* dan *word*, dengan adanya Siskeudes pengelolaan keuangan desa sangat dipermudah, sistematis dan transparansi antara pemerintah desa dengan masyarakat dan pusat, jika adanya desa yang tidak atau belum menerapkan sistem keuangan desa berbasis online tersebut dapat dikatakan, pengelolaan keuangan desa itu sangat tidak tersistematis dan rapih dikarnakan sekarang ini Siskeudes berkaitan dengan *Online Monitor* Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (OMSPAN) untuk keuangan desa, yang dapat kita ketahui bahwa OMSPAN ialah untuk memonitoring transaksi pelaksanaan APBN, dan menyajikan reporting sesuai kebutuhan. Dinilai dari indikator bahwa para pengguna aplikasi siskeudes merasa, aplikasi siskeudes sangat mudah untuk digunakan, asalkan berbekal bimbingan teknis atau pelatihan pada aplikasi Siskeudes.

2. Berdasarkan ketepatan sasaran aplikasi Siskeudes, para pengelola merasa dalam pengoprasiannya juga aplikasi Siskeudes mudah untuk diingat dan terjamin dalam keamanannya dikarnakan aplikasi Siskeudes saat ini telah melakukan pembaharuan, dimana saat ini aplikasi Siskeudes telah memiliki *user administrator*, yang hanya dapat diakses oleh para operator Siskeudes.
3. Kepuasan program, yang dirasakan pada pengelolaan sistem keuangan desa, baik dari aplikasi maupun pengguna (pengelola) ialah pelatihan yang belum maksimal dari pusat, atau pelatihan bimbingan teknis (BIMTEK), serta pelaporan dalam bentuk fisik yang masih manual, perbedaan yang dapat dirasakan juga bahwa skill sumber daya manusia (SDM) atau pemerintah desa sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan ini, mulai dari pemahaman dari pergantian mengelola secara manual ke aplikasi, hambatan sinyal atau komputer yang tidak memadai, dan dalam pelaporan.

4. Tingkat output dan input berdasarkan data yang diinput dan hasil akhir dari adanya Siskeudes, seperti data perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pembukuan. Semua data tersebut pelaksanaan kegiatan program-program satu tahun terakhir berupa laporan-laporan dari capaian kerja serta hasil akhir dari adanya Siskeudes ialah sangat membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa khususnya dalam pelaporan. Akhir pencapaian tujuan adanya aplikasi Siskeudes ini sangat baik untuk pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, akan tetapi pada desa Gebang dan Munca masih belum berjalan optimal dalam transparasi kepada masyarakat.

5. Pencapaian tujuan seperti dijelaskan pada komponen sebelumnya bahwa pengelolaan keuangan desa melalui Siskeudes sangat membantu pemerintahan desa dalam mengurus keuangan desanya, dari penginputan sampai laporan yang dihasilkan, yang diharapkan dapat memastikan bahwa semua laporan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi persyaratan regulasi tetapi juga memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai pengelolaan keuangan desa. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa.

Tabel 29. Perbandingan Desa

Desa Hanura (Mandiri)	Desa Gebang (Maju)	Desa Munca (Berkembang)
Pada desa mandiri para operator desa termasuk operator yang telah siap dalam penggunaan Siskeudes, dengan tingkat kemudahan paling cepat dalam memahami penggunaan aplikasi Siskeudes.	Pada desa Maju para operator termasuk cukup terkendala dalam memahami penggunaan aplikasi Siskeudes, membutuhkan waktu yang cukup lama.	Pada desa berkembang para operator termasuk cukup terkendala dalam memahami penggunaan aplikasi Siskeudes, membutuhkan waktu yang cukup lama.
Sarana dan prasarana pada desa mandiri sudah sangat didukung dan memadai.	Sarana dan prasaran pada desa maju cukup memadai.	Sarana dan prasarana pada desa berkembang kurang memadai, terutama pada sinyal desa.
Transparasi pada desa mandiri berupa laporan keuangan kepada masyarakat melalui web dan banner	Transparasi pada desa maju berupa laporan keuangan kepada masyarakat melalui banner yang terdapat pada depan kantor kepala desa	Transparasi pada desa berkembang belum berjalan maksimal dikarenakan belum adanya laporan kepada masyarakat baik melalui web maupun banner.
Prioritas dana lebih terfokus pada pengembangan, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan	Terfokus pada penyediaan kebutuhan dasar, seperti air bersih jalan dan fasilitas kesehatan	Memprioritaskan kebutuhan dasar seperti perbaikan jalan, jembatan dan infrastruktur dasar lainnya

Sumber: Olahan Peneliti

Perbandingan yang sangat dirasakan dari ketiga desa, yaitu desa gebang dengan status desa maju, ialah pada operator atau pemerintah desa gebang masih terasanya kendala dalam memahami penggunaan aplikasi siskeudes, dimana dengan kendala tersebut operator desa merasa membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pengelolaan serta sarana prasarana yang cukup memadai, dengan transparasi pada masyarakat yang kurang mendukung, dengan prioritas dana terfokus pada penyediaan kebutuhan dasar seperti air bersih, jalan dan fasilitas kesehatan. Sedangkan pada desa hanura dengan status desa Mandiri, operator termasuk yang

paling siap dalam penggunaan Siskeudes, dari pengelola, sarana dan prasana, serta didukung transparansi pada masyarakat dengan menggunakan website dan banner, dengan fokus prioritas dana lebih terfokus pada pengembangan, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Dan pada desa berkembang yaitu desa Munca, operatis termasuk terkendala dalam memahami penggunaan siskeudes, serta sarana dan prasana yang kurang mendukung, dengan prioritas dana lebih kebutuhan dasar seperti, perbaikan jalan, jembatan, dan infrastruktur dasar lainnya.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan serta pembahasan yang sudah tertulis, maka peneliti dapat menyimpulkan, penelitian ini menunjukkan bahwa Siskeudes 2.0.5 efektif dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan regulasi. Meskipun demikian, masih ada kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan efisiensi proses lebih lanjut seperti dalam hal sarana dan prasarana. Namun, secara keseluruhan, penggunaan Siskeudes 2.0.5 di Desa Gebang, Munca, dan Hanura telah mencapai tujuan pengelolaan keuangan desa yang baik, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada pemerintah daerah maupun masyarakat luas.

Adapun Proses penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 2.0.5 di Desa Gebang, Munca, dan Hanura Kabupaten Pesawaran menunjukkan bahwa sistem ini sangat andal dalam pengelolaan keuangan desa. Penginputan data melalui Siskeudes mencerminkan tingkat akurasi yang tinggi dan kepatuhan terhadap regulasi serta standar akuntansi yang berlaku. Hal ini menegaskan bahwa Siskeudes 2.0.5 mampu menyediakan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu, yang sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik oleh pemerintah desa. Ketersediaan informasi seperti rekapitulasi anggaran, realisasi, dan data aset melalui Siskeudes membantu pemerintah desa dalam mengevaluasi program, merencanakan pengembangan infrastruktur, dan mengelola kekayaan desa. Akurasi data yang tinggi ini menunjukkan bahwa data yang diinput sesuai dengan dokumen pendukung dan realitas di lapangan, sehingga laporan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi persyaratan regulasi tetapi juga memberikan

gambaran yang jelas dan transparan mengenai pengelolaan keuangan desa. Transparansi dan akuntabilitas yang dihasilkan oleh sistem ini penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Selain itu, efektivitas pengelolaan keuangan desa melalui Siskeudes 2.0.5 dapat dilihat dari berbagai indikator keberhasilan program seperti ketepatan sasaran, kepuasan pengguna, serta tingkat output dan input yang baik. Aplikasi ini sangat membantu pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Gebang, Munca, dan Hanura juga sudah sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menggunakan aplikasi Siskeudes, aparat desa dapat menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang relevan, akuntabel, dan transparan.

Pencapaian tujuan dari ketiga desa, sebagai berikut:

Indikator	Penjelasan Pencapaian Tujuan
Kemudahan	Dalam menguasai siskeudes ketiga desa memiliki pandangan yang berbeda, operator desa hanura merasa cukup menguasai dalam waktu yang singkat, sedangkan desa gebang dan munca memiliki pandangan bahwa menguasai aplikasi membutuhkan waktu yang cukup lama
Keberhasilan Sasaran	Dalam keberhasilan sasaran atau target sasaran, tidak adanya target sasaran dikarenakan siskeudes hanya aplikasi pelaporan tidak adanya kebijakan seperti ada target sasaran
Kendala dan tingkat keamanan	Mengenai kendala aplikasi siskeudes masih dapat melakukan perbaikan mandiri atau mengatasi sendiri, sedangkan untuk tingkat keamanan aplikasi siskeudes terus melakukan perbaharuan untuk meningkatkan keamanan
Kepuasan	Kepuasan di aplikasi siskeudes tentunya telah mencapai tujuan, yaitu membantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan.
Tingkat output dan input	Dalam tingkat ouput dan input telah memenuhi capaian tujuan yaitu mencantumkan informasi ke publik mengenai anggaran, akan tetapi di desa gebang dan munca belum berjalan dengan optimal

6.2 Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Mulai pengadaan media atau lebih memberi perhatian lebih akses seperti website resmi agar warga lain atau masyarakat sendiri dapat mencari informasi lebih lanjut terkait dengan perkembangan desa
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat mendukung proses pengelolaan keuangan desa
3. Meningkatkan sumber daya manusia khususnya pada operator sistem keuangan desa
4. Lebih bersosialisasi dengan masyarakat guna mengalokasikan dana dengan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ambarwati, A. (2021). *Perilaku dan Teori Organisasi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Bastian, Indra. (2015). *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- BPKP. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Tim penyusun Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Danandjaja. (2012). *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Dewanti, E. (2015). *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng*.
- Herdiansyah, H . (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Indrajit, R.E. (2005). *E-Government In Action*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, L. J. (2004). *Metodelogi Penelitian*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurholis, H. (2011). *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga. Di akses paada URI: <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20394030>
- Parson, et. al. (1994). *The integration Of social Work Practice*. California Wardworth.inc.
- Patton, M. Q. (2009). *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Rahman, M. (2017). *Ilmu Administrasi*. Makasssar: CV. Sah Media
- Rangkuti, F. (2009). *Mengukur Efektivitas Program Promosi & Analisis Kasus Menggunakan SPSS*. PT Gramedia Pustaka Utama.

- Ratminto & Atik, S. (2005). *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Steers, Richard M. 1(985). *Efektivitas Organisasi (Kaidah Perilaku)*. Jakarta: Erlangga
- Suaedi., Falih., & Wardiyanto. (2010). *Revitalisasi Administrasi Negara (reformasi Birokrasi dan E-Governance.)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supardi. (2013) *Aplikasi Statistika dalam Penelitian Konsep Statistika yang Lebih Komprehensif*. Jakarta: Change Publication.
- Tannady, Hendy. (2015). *Pengendalian Kualitas*, Jakarta : Graha Ilmu.
- The Liang Gie. (1996). *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Wibawa, S. (2009). *Administrasi Negara; Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jurnal:

- Ayu, P.D.W. 2017. Analisis Pengukuran Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Sistem Informasi Manajemen Surat STIKOM Bali. *Jurnal Sistem dan Informatika (JSI)*, 11 (2), 99-109. <https://jsi.stikom-bali.ac.id/index.php/jsi/article/view/117>
- Cahyana, P. G, & Suprasto, H.B. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Air Mandidi Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua). *E-jurnal Akuntansi*, 33(2), 556-569, DOI: <https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i02.p19>
- Dakhi, Y. (2016). Implementasi POAC Terhadap Kegiatan Organisasi Dalam Mencapai Tujuan Tertentu. *Jurnal Warta Dharmawangsa Edisi: 50*. ISSN : 1829-7463
- Dwiyanto, D. (2002). *Metode Kualitatif: Penerapannya dalam Penelitian. Universitas Gajah Mada*. Diakses dari: <https://www.academia.edu/download...>, 0, 1-7.
- Fahri, L. N. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 75-88.

- Handiwidjojo, W., & Ernawati, L. (2016). Pengukuran Tingkat Ketergunaan (Usability) Sistem Informasi Keuangan Studi Kasus: Duta Wacana Internal Transaction (Duwit). *Jurnal Informatika dan Sistem Informasi*, 2(1), 49-55.
- Kurniasih, D., Fidowaty, T., & Sukaesih, P. (2013). Pengaruh Implementasi Kebijakan E-Government Terhadap Kinerja Aparatur Kota Cimahi. *Sosiohumaniora*, 15(1), 6-14, DOI:10.24198/sosiohumaniora.v15i1.5234
- Lajaba, P. D. Y., Halim, M. and Aspirandi, R. M. (2022). Systematic Literature Review: Aplikasi Siskeudes Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Dan Kinerja Perangkat Desa. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis)*, 8(2), pp. 66 - 76. doi: 10.38204/jrak.v8i2.799.
- Mahriadi, N., Agustang, A., Idhan, A. M., & Rifdan, R. (2021). Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(2), 324-336, DOI:10.37606/publik.v8i2.254
- Rachman, P. (2020). Implementasi Plan-Do-Check-Act (Pdca) Berbasis Key Performance Indicators (Kpi): Studi Kasus Di Smp-Sma Integral Ar- Rohmah Dau Malang. *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 14-27, DOI:10.33650/al-tanzim.v4i2.981
- Rivan, A., & Maksum, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), 92-100, DOI:http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487
- Sitepu, Y. S. (2011). Paradigma dalam Teori Organisasi dan Implikasinya pada Komunikasi Organisasi. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1(2), 83-91.
- Trisnadewi, A. A. A. E., Amlayasa, A. A. B., & Rupa, I. W. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Siskeudes Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 37-52, DOI:10.33369/j.akuntansi.10.1.37-52

Referensi lain:

- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan” (On-Line), tersedia di: <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp> (Mei 2024).
- Misuraca, G. (2007). *e-Governance in Africa : From Theory to Action : A Handbook ICTs for Local Governance*. Di akses pada [http : idrc.ca/en/ev/-13398-201- IDO-TOPIC.html](http://idrc.ca/en/ev/-13398-201-IDO-TOPIC.html). diakses : 2/2/2013.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa* .

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 *Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT)*.

Starawaji. (2009) Efektivitas Pembelajaran. Diakses pada [Http://Starawaji.Wordpress.Com/2009/03/01/ #More-56](http://Starawaji.Wordpress.Com/2009/03/01/#More-56), diakses tanggal 4 Januari 2024)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.